

Laporan Hasil Penelitian

Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS (Voter Turn-Out)

**Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015**



Oleh:

Fakhruddin, M.Pd.I

Baryanto, S.Pd., MM.

Muhammad Anshori, S.Sos.I

Kerja Sama

**Pusat Penelitian Pengabdian Masyarakat (P3M)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup**

dengan


**Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Rejang Lebong**

Tahun 2015

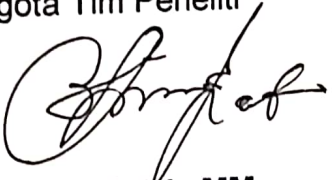
**HALAMAN IDENTITAS
DAN PENGESAHAN PENELITIAN**

1.	a. Judul Penelitian	:	Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS (Voter Turn-Out) Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015
	b. Jenis Penelitian	:	Ilmu Terapan
	c. Bidang Ilmu	:	Sosiologi Politik
	d. Kategori Penelitian	:	Kelompok
2.	Ketua Tim Peneliti		
	Nama Lengkap	:	Fakhruddin, M.Pd.I
	NIP	:	197501122006041009
	Pangkat/Gol.	:	Penata/Lektor/Illd
	Jabatan Sekarang	:	Tenaga pengajar STAIN Curup
3.	Anggota Tim Peneliti		
	Nama Lengkap	:	Baryanto, S.Pd., MM
	NIP	:	19690723 199903 1 004
	Pangkat/Gol.	:	Pembina/Asisten Ahli/Va
	Jabatan Sekarang	:	Tenaga pengajar
4.	Anggota Tim Peneliti		
	Nama Lengkap	:	Muhammad Anshori, S.Sos.I
	NIP	:	
	Pangkat/Gol.	:	
	Jabatan Sekarang	:	Staff P3M STAIN Curup
5.	Lokasi Penelitian	:	Kabupaten Rejang Lebong
6.	Jangka Waktu Penelitian	:	Juni s.d. Juli 2015

Curup, 1 Oktober 2015
Ketua Tim Peneliti,


Fakhruddin, M.Pd.I
NIP 197501122006041009


Anggota Tim Peneliti


Baryanto, S.Pd., MM
NIP 19690723 199903 1 004

Anggota Tim Peneliti


Muhammad Anshori, S.Sos.I
NIP

Mengetahui:
Ketua STAIN Curup,


Dr. Budi Kisworo, M.Ag
NIP 195501111976031002

MENEGATHUI
Ketua KPU Rejang Lebong


Halid Saifullah, SH. MH



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT laporan penelitian yang berjudul **Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS (Voter Turn-Out) Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015** ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan atas selesainya penelitian ini yang antara lain pada :

1. Ketua KPU Rejang Lebong yang telah memberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan penelitian ini
2. Bapak Ketua STAIN Curup yang telah memberi dorongan untuk melaksanakan penelitian ini.
3. Responden yang berkenan membri jawaban dan masukan tentang data yang diperlukan
4. Serta seluruh pihak yang telah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam proses dan penyelesaian penelitian ini.

Semoga Allah membalas jasa baik semua pihak yang telah membantu proses penelitian ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Akhirnya kritikan dan masukan dari pembaca dan semua pihak dengan senang hati akan diterima demi penyempurnaan penelitian yang akan datang.

Curup, 15 Juli 2015
Ketua Peneliti,



Fakhruddin, M.Pd.I
NIP 197501122006041009

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar Peneliti	iii
Daftar Isi	iv
Abstrak.....	
Bab 1 Pendahuluan	
Latar Belakang Masalah	1
Rumusan Masalah	5
Tujuan Penelitian	6
Manfaat Penelitian	6
Metodologi Penelitian.....	7
Bab 2 Landasan Teoritis	
Acuan Teoritis	18
Bab 3 Hasil Penelitian	
Sekilas Kab. Rejang Lebong.....	32
Daftar Pemilih Tetap Kab. Rejang Lebong.....	33
Tabulasi Hasil Penelitian Penelitian	34
Kecenderungan Pemilih Mendatangi TPS	37
Kecenderungan Pemilih Mendatangi TPS Menggunakan Hak/Suaranya ..	44
Faktor-Faktor Pemilih Mendatangi TPS	51
Bab 4 Penutup	
Simpulan.....	61
Implementasi Hasil Penelitian dan Saran	64
Daftar Pustaka	
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

Abstraks

Tingkat partisipasi politik adalah faktor yang menentukan apakah Pemilu ataupun Pilkada yang berlangsung berhasil atau tidak, semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih, maka tingkat keberhasilan Pemilu ataupun Pilkada semakin tinggi. Partisipasi pemilih sejak pemilu 1999 sampai dengan pemilu 2014 bergerak fluktuatif. Pertanyaan terhadap angka partisipasi pemilih juga mengemuka pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak pada akhir tahun ini, termasuk di Kabupaten Rejang Lebong. Pertanyaan yang diteliti adalah; bagaimana kecenderungan perilaku pemilih mendatangi TPS, apakah menggunakan hak pilih/suaranya, dan Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan perilaku pemilih tersebut dalam Pilkada di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015 nanti? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi, yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Kecenderungan perilaku pemilih mendatangi TPS dalam Pilkada di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015 nanti, sangat tinggi mencapai 94,7% memiliki kecendrungan akan hadir di TPS. Dilihat dari sub-variabel; jenis kelamin, agama, umur, pendidikan, pekerjaan dan tempat tinggal. Serta dari data tersebut 94,7% menyatakan akan menggunakan hak/suaranya. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kecendrungan sikap tersebut adalah; sikap individu, lingkungan sosial politik langsung, lingkungan sosial politik tak langsung, dan keadaan ketika memutuskan kehendak mendatangi TPS serta menggunakan hak/suaranya. Tingginya kecendrungan pemilih hadir di TPS, memperlihatkan partisipasi masyarakat akan tinggi sehingga harus dijaga stabilitas dan pencitraan penyelenggaraan Pilkada ke depan.

Kata Kunci: Partisipasi, Voter Turn-Out, dan Pilkada.

Bab 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Partisipasi pemilih sejak pemilu 1999 sampai dengan pemilu 2014 bergerak fluktuatif. Pada pemilu legislatif, penurunan partisipasi pemilih sekitar 10% konsisten terjadi sampai pada pemilu 2009. Sementara itu pada pemilu 2014, angka partisipasinya naik sebesar 5%. Pada kasus pilpres, tercatat dalam pemilu 2014 pertama kalinya dalam sejarah angka partisipasinya lebih rendah dibandingkan pemilu legislatif. Pertanyaannya, kenapa angka partisipasi pemilu legislatif naik dibandingkan pemilu sebelumnya? Kenapa angka partisipasi Pilpres menyimpang dari pola pada pemilu-pemilu sebelumnya? Selain itu kenapa golput tetap saja hadir dalam setiap pemilu? Apa penyebabnya?

Pertanyaan-pertanyaan terhadap angka partisipasi pemilih tersebut juga mengemuka pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak pada akhir tahun ini. Termasuk di Kabupaten Rejang Lebong, rakyat Kabupaten Rejang Lebong akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan salah satu konsekwensi demokrasi, disamping tututan konstitusi menghendaki Pemilu serentak. Oleh karena itu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ini diharapkan bisa membawa rakyat lebih demokratis, karena rakyat telah diberikan otonomi, dalam pemilu dimana rakyat diberikan kebebasan untuk memilih calon kepala daerah dan calon

wakil kepala daerah. Pilkada langsung terkait dengan kedaulatan rakyat mencakup hal-hal sebagai berikut:¹

- 1) Rakyat secara langsung dapat menggunakan hak-hak pilihnya secara utuh. Menjadi kewajiban Negara memberikan perlindungan terhadap hak pilih rakyat. Salah satu hak politik rakyat tersebut adalah hak memilih calon pemimpin.
- 2) Wujud nyata asas pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Pertanggungjawaban (*responsibility*) dan akuntabilitas (*accountability*) public seorang pemimpin merupakan landasan yang amat penting guna menjaga kelangsungan sebuah kepemimpinan politik. Melalui pilkada langsung, maka seorang Kepala Daerah harus dapat mempertanggungjawabkan kepemimpinan kepada rakyat yang memilih. Tingkat penerimaan rakyat kepada Kepala Daerah merupakan jaminan bagi peningkatan partisipasi politik rakyat yang akan menjaga kelanggengan sebuah kepemimpinan.
- 3) Menciptakan suasana kondusif bagi terciptanya hubungan sinergis antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah akan melaksanakan kehendaknya sesuai dengan kehendak rakyat. Keserasian dan keseimbangan hubungan antara keduanya akan membawa pengaruh yang sangat menentukan bagi tegaknya suatu pemerintahan yang demokratis.

Peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai

¹ Joko J Prihatmoko. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar. Hal 128-130

politik atau Gabungan Partai Politik secara berpasangan. Pasangan calon adalah yang paling penting dalam Pilkada, dimana mereka yang akan bersaing merebut hati masyarakat untuk mendukung mereka sehingga mereka dapat menduduki kursi jabatan. Dengan sistem Pilkada langsung, sebelum berjuang mendapatkan dukungan dari masyarakat, setiap pasangan calon harus terlebih dahulu berusaha merebut dukungan Partai Politik sebagai kendaraannya untuk maju dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Setelah mendapatkan dukungan Partai Politik, baru kemudian dalam Pilkada langsung setiap pasangan calon harus berusaha merebut dukungan masyarakat untuk dapat memenangkan kursi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Walaupun rakyat yang menentukan siapa yang akan menduduki kursi Kepala dan Wakil Kepala Daerah, akan tetapi partai politik masih memiliki pengaruh yang sangat besar, dikarenakan partai politiklah yang dapat menentukan apakah setiap pasangan calon bisa maju atau tidak dalam pemilihan umum, Partai Politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD di daerah yang bersangkutan dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan.²

Dalam Pilkada secara langsung faktor orientasi kandidat diyakini berpengaruh besar terhadap kemenangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, hal ini disebabkan setiap pasangan calon berinteraksi langsung dengan pemilih dan pemilih akan tahu kualitas kandidat pasangan kepala daerah dan Wakil kepala daerah yang maju dalam Pilkada secara

² PP No 6 Tahun 2005 pasal 36 ayat2

langsung begitu pula dengan faktor yang diusung kandidat akan mempengaruhi pula terhadap kemenangan calon.

Oleh karena itu, dengan adanya Pilkada ini maka rakyatlah yang menentukan siapa yang akan duduk menduduki jabatan Kepala dan Wakil Kepala Daerah dalam Pilkada secara langsung. Pemberian suara atau *voting* secara umum dapat diartikan sebagai; “Sebuah proses dimana seorang anggota dalam suatu kelompok menyatakan pendapatnya dan ikut menentukan konsensus diantara anggota kelompok seorang pejabat maupun keputusan yang diambil”.³ Pemberian suara dalam Pilkada secara langsung diwujudkan dengan memberikan suara pada pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selama ini paling tidak ada tiga faktor yang mempengaruhi untuk memilih atau tidak memilih dalam Pemilu⁴, yaitu: *Pertama*, identitas partai, dimana semakin solid dan mapan suatu partai politik maka akan memperoleh dukungan yang mantap dari pendukungnya. Sebaliknya kondisi partai politik yang buruk akan mengakibatkan berkurangnya dukungan terhadap partai yang politik yang bersangkutan. Begitu pula dalam Pilkada secara langsung, dimana pasangan calon kepala daerah yang didukung oleh partai politik yang solid dan mapan akan mendapat dukungan dari pendukung dan simpatisan partai tersebut.

Kedua, kemampuan partai dalam menjual isu kampanye. Partai yang Hegemoni (*status qua*) biasanya menjual isu-isu keamanan dan

³ Gosnel F Horald. 1934. *Ensyklopedia Of The Social Science*. New York: Mc Grew Hill Book Company. hal 32.

⁴ Sobirin Malian. 2004. *Menakar Loyalitas dan Volatilitas Pemilih Pada Pemilu 2004* 9 (dalam Jurnal UNISIA NO. 51/XXVII/I/2004). Yogyakarta: Unisia. hlm 81-82

keberhasilan yang telah mereka raih. Partai-partai politik baru biasanya menjual isu-isu “menarik” dan partai politik tersebut, biasanya dianggap “bersih” terutama dari nuansa *money politics*.

Ketiga, penampilan kandidat, dimana performa kandidat sangat menentukan keberhasilan kandidat.

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perilaku pemilih mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS)? Apa yang menjadi pertimbangan pemilih menggunakan hak pilih/suaranya? Dan Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih mendatangi TPS dan menggunakan hak pilihnya?

Dari uraian tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan judul **Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS (Voter turn-out) Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan penjelasan mengenai alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam penelitian itu dipandang menarik, penting dan perlu untuk diteliti. Perumusan masalah juga merupakan suatu usaha yang menyatakan pertanyaan-pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicari pemecahannya. Atau dengan kata lain perumusan masalah merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti didasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah.⁵

Dari latar belakang penelitian tersebut, maka yang jadi rumusan masalah

⁵ Husani Usman dan Purnomo. *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung :Bumi Aksara. 2004, hal 26.

adalah:

1. Bagaimana kecenderungan perilaku pemilih mendatangi TPS dalam Pilkada di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015 nanti?
2. Bagaimana kecenderungan perilaku pemilih yang mendatangi TPS menggunakan hak pilih/suaranya dalam Pilkada di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015 nanti?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan perilaku pemilih mendatangi TPS dan menggunakan hak pilih/suaranya dalam Pilkada di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015 nanti?"

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui kecenderungan perilaku pemilih mendatangi TPS dalam Pilkada di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015 nanti.
2. Untuk mengetahui kecenderungan perilaku pemilih yang mendatangi TPS menggunakan hak pilih/suaranya dalam Pilkada di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015 nanti.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan perilaku pemilih mendatangi TPS dan menggunakan hak pilih/suaranya dalam Pilkada di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015 nanti.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini sekiranya dapat bermanfaat manambah khazanah kepustakaan politik.

2. Sebagai rujukan bagi KPU untuk mengambil kebijakan penyelenggaraan pemilu kada.
3. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengasah kemampuan penulis dalam meneliti fenomena politik yang terjadi, sehingga menambah pengetahuan penulis mengenai masalah yang diteliti.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi. Menurut Sugiyono, “metode penelitian kombinasi adalah metode penelitian yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif”.⁶ Terdapat beberapa alasan mengapa peneliti menggunakan metode kombinasi ini. Alasan tersebut antara lain adalah:⁷

a. Different research question

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yang berbeda, pertama adalah “Bagaimana kecenderungan perilaku pemilih mendatangi TPS dalam Pilkada di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015 nanti?” dalam pengumpulan data dan analisa lebih ditekankan penggunaan metode kuantitatif. Kedua adalah “Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan perilaku pemilih mendatangi TPS dan menggunakan hak pilih/suaranya dalam Pilkada di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015 nanti?” dalam pengumpulan data dan analisa lebih ditekankan penggunaan metode kualitatif. Selanjutnya

⁶ Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Bandung, CV. Alfabeta. Halaman 397

⁷ Jonathan Sarwono, 2011, Mixed Methods Cara Menggabung Riset Kuantitatif dan Riset Kualitatif Secara Benar, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo. Halaman 7-10

kedua data tersebut dilakukan meta-analisis untuk mengetahui kedua data tersebut saling memperkuat, bertentangan atau memperlemah.

b. Triangulation

Triangulation merupakan penggunaan lebih dari satu metode untuk digunakan sebagai cek silang. Dengan beberapa temuan yang berbeda diharapkan menghasilkan temuan yang sama.

c. Offset

Sarana penyeimbang, data kuantitatif (kuesioner) yang diperoleh digunakan sebagai penyeimbang data kualitatif (wawancara mendalam).

d. Completeness

Sarana melengkapi antar metode. Peneliti berharap agar data yang diperoleh dari masing-masing metode, baik itu kualitatif maupun kuantitatif akan saling melengkapi satu sama lain sehingga temuan lebih bersifat komprehensif.

e. Confirm and discover

Sarana konfirmasi, dengan penggunaan dua metode (kualitatif dan kuantitatif) bertujuan untuk mengkonfirmasi lebih lanjut informasi yang diperoleh peneliti sehingga menghasilkan temuan-temuan yang lebih valid.

Model penelitian kombinasi yang digunakan adalah *concurrent triangulation* (campuran seimbang) yang menggabungkan antara metode penelitian kualitatif dengan kuantitatif dengan cara mencampur kedua metode tersebut secara seimbang dan bersama-sama (50% metode kuantitatif dan 50% metode kualitatif) dalam waktu yang sama, tetapi

independen untuk menjawab rumusan masalah sejenis.⁸ *Model concurrent triangulation* ini dipilih dengan tujuan agar dapat mengatasi kelemahan atau kekurangan dari satu teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain sehingga diperoleh data yang lebih lengkap, valid, reliabel, objektif dan waktu yang digunakan lebih efisien.

Terdapat dua bentuk rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini seperti yang telah dijelaskan di atas. Kedua rumusan masalah tersebut merupakan rumusan masalah yang bersifat deskriptif sehingga peneliti akan menjelaskan dan mengeksplorasi serta memotret situasi sosial yang terjadi pada masyarakat pemilih secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Fokus penggabungan dua metode (kualitatif dan kuantitatif) lebih pada teknik pengumpulan data dan analisis data, sehingga peneliti dapat membandingkan seluruh data temuan dari kedua metode tersebut, yang selanjutnya diperoleh kesimpulan dan saran apakah kedua data saling memperkuat, memperlemah atau bertentangan. Untuk rumusan masalah 1 dan 2 tentang, peneliti lebih menekankan penggunaan teknik pengumpulan data secara kuantitatif yaitu dengan menyebarkan sejumlah kuesioner terhadap sejumlah masyarakat yang mempunyai hak pilih. Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah 3, peneliti lebih menekankan penggunaan teknik pengumpulan data secara kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara mendalam terhadap masyarakat yang mempunyai hak pilih.

Pada penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif

⁸ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung, CV. Alfabeta. Halaman 499-77

yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji teori yang telah ditetapkan. Hal ini agar peneliti memperoleh data yang lengkap dan gambaran untuk menemukan persentase kecenderungan kedatangan pemilih ke TPS dan penggunaan hak pilih/suaranya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang diteliti dan berusaha untuk membrikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang apa yang sedang diteliti dan menjadi pokok permasalahan. Nawawi mengemukakan bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai : “prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain)”. Adapun cirri-ciri pokok metode deskriptif adalah :

- a. Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual.
- b. Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya.

Adapun bentuk dari metode deskriptif yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah survey (*survey studies*) yaitu survey kemasyarakatan (*community survey*). Menurut nawawi maksudkan untuk mengungkapkan aspek atau beberapa aspek tertentu dalam kehidupan masyarakat. Melalui

penelitian ini dikumpulkan data untuk mengambil kesimpulan tentang pendapat, keinginan, kebutuhan, kondisi dan lain-lain di dalam masyarakat mengenai aspek yang diselidiki.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Rejang Lebong, lokasi penelitian tersebut adalah daerah tempat peneliti bertempat tinggal, sehingga akan lebih mudah bagi peneliti mendapatkan data baik dari masyarakat maupun dari instansi yang terkait dengan penelitian nantinya. Selain itu akan lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat sehingga akan mempermudah dalam hal memperoleh data dari para responden.

3. Populasi dan Sampel

Populasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu "population" yang berarti jumlah penduduk. Populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dsb, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian.

Maka, yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah semua Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Rejanglebong, saat ini sebanyak 197.086 pemilih atau mengalami pengurangan 480 pemilih dari DPT 11 September 2013 lalu. "Jumlah DPT yang ditetapkan 11 September lalu yakni sebanyak 197.566 pemilih yang tersebar dalam 15 kecamatan, setelah dilakukan pencermatan DPT di setiap kecamatan terjadi pengurangan pemilih sebanyak 480 pemilih sehingga jumlah DPT akhir Kabupaten Rejanglebong menjadi 197.086 pemilih,".

Data dari hasil pencermatan itu diketahui dari 15 kecamatan yang ada terdapat dua kecamatan yang DPT-nya mengalami penambahan yakni di Kecamatan Curup bertambah 140 pemilih dari 19.454 pemilih menjadi 19.594 pemilih. Kemudian di Kecamatan Sindang Beliti Ulu terjadi penambahan 16 pemilih dari 9.118 menjadi 9.134 pemilih.

Sebaliknya DPT dalam 13 kecamatan lainnya justru mengalami penurunan antara lain Kecamatan Curup Tengah dengan jumlah mata pilih tetap 25.918 pemilih jumlah ini berkurang dari DPT sebelumnya sebanyak 26.016. Selanjutnya Kecamatan Curup Selatan dari 15.069 pemilih menjadi 15.001 pemilih. Kecamatan Curup Utara dari 12.379 pemilih menjadi 12.350 pemilih. Kemudian Kecamatan Curup Timur dari 16.981 menjadi 16.977 pemilih.

Kecamatan Bermani Ulu dengan mata pilih 9.387 dari jumlah sebelumnya sebanyak 9.412 pemilih. Kecamatan Selupu Rejang 21.437 pemilih dari jumlah sebelumnya 21.496 pemilih. Kecamatan Sindang Kelingi dari mata pilih sebanyak 10.912 pemilih menjadi 10.896 pemilih. Kecamatan Sindang Dataran sebanyak 9.214 pemilih dari jumlah sebelumnya 9.242 mata pilih.

Kecamatan Binduriang dari 7.996 pemilih menjadi 7.992 pemilih, kemudian Kecamatan Sindang Beliti Ilir dari 6.746 pemilih menjadi 6.661 pemilih, Kecamatan Padang Ulak Tanding, dari 14.676 pemilih menjadi 14.586 pemilih, Kecamatan Kota Padang dari mata pilih sebanyak 10.198 pemilih menjadi 10.072 pemilih serta DPT Kecamatan Bermani Ulu Raya sebanyak 7.872 pemilih menjadi 7.847 pemilih.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumus *slovin*⁹ yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

keterangan :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Nilai kritis(batas ketelitian) yang diinginkan,yaitu sebesar 10% dengan tingkat kepercayaan 90%

$$n = \frac{197.086}{1 + 197,086}$$

$$= \frac{197.086}{198,086}$$

$$= 999,40$$

Tehnik yang digunakan dalam pengambilan sampel tehnik *probability sampel*, dimana setiap responden dari semua populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, dipergunakan dua sumber pengumpulan data, yaitu: pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder.

- a. Data Primer Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer dalam penelitian ini dapat berasal responden yang memberikan suara dalam pilkada.

⁹ Consuelo, G. Selvilla. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta : UI Press. 1993. Hal 161

Data dikumpulkan dengan Kuesioner dan wawancara dengan cara memberikan sejumlah daftar pertanyaan kepada responden berkaitan dengan masalah yang diteliti.

- b. Data Sekunder yaitu semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian (*Library Research*) dan pencatatan dokumen antara lain dengan mengumpulkan data dari buku-buku, literature, jurnal ,majalah, Koran dan internet yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan metode penelitian, dalam menganalisa data, data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Metode kualitatif dapat didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang diamati.

Marshall dan Rossman mengajukan teknik analisa data kualitatif untuk proses analisis data dalam penelitian ini. Dalam menganalisa penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan¹⁰, diantaranya :

- a. Mengorganisasikan Data

Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui angket dan wawancara mendalam (*indepth inteviewer*), dimana data tersebut direkam dengan tape recorder dibantu alat tulis lainnya. Kemudian

¹⁰ Marshall dan Rossman dalam Kabalmay, 2002

dibuatkan transkripnya dengan mengubah hasil wawancara dari bentuk rekaman menjadi bentuk tertulis secara verbatim. Data yang telah didapat dibaca berulang-ulang agar penulis mengerti benar data atau hasil yang telah di dapatkan.

b. Pengelompokan berdasarkan Kategori, Tema dan pola jawaban

Pada tahap ini dibutuhkan pengertian yang mendalam terhadap data, perhatian yang penuh dan keterbukaan terhadap hal-hal yang muncul di luar apa yang ingin digali. Berdasarkan kerangka teori dan pedoman wawancara, peneliti menyusun sebuah kerangka awal analisis sebagai acuan dan pedoman dalam melakukan coding. Dengan pedoman ini, peneliti kemudian kembali membaca transkrip wawancara dan melakukan *coding*, melakukan pemilihan data yang relevan dengan pokok pembicaraan. Data yang relevan diberi kode dan penjelasan singkat, kemudian dikelompokan atau dikategorikan berdasarkan kerangka analisis yang telah dibuat.

Pada penelitian ini, analisis dilakukan terhadap sebuah kasus yang diteliti. Peneliti menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal diungkapkan oleh responden. Data yang telah dikelompokan tersebut oleh peneliti dicoba untuk dipahami secara utuh dan ditemukan tema-tema penting serta kata kuncinya. Sehingga peneliti dapat menangkap pengalaman, permasalahan, dan dinamika yang terjadi pada subjek.

c. Menguji Asumsi atau Permasalahan yang ada terhadap Data

Setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, peneliti menguji data tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam

penelitian ini. Pada tahap ini kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau kembali berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan dalam bab II, sehingga dapat dicocokkan apakah ada kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai. Walaupun penelitian ini tidak memiliki hipotesis tertentu, namun dari landasan teori dapat dibuat asumsi-asumsi mengenai hubungan antara konsep-konsep dan factor-faktor yang ada.

d. Mencari Alternatif Penjelasan bagi Data

Setelah kaitan antara kategori dan pola data dengan asumsi terwujud, peneliti masuk ke dalam tahap penjejelasan. Dan berdasarkan kesimpulan yang telah didapat dari kaitanya tersebut, penulis merasa perlu mencari suatu alternative penjelasan lain tetng kesimpulan yang telah didapat. Sebab dalam penelitian kualitatif memang selalu ada alternative penjelasan yang lain. Dari hasil analisis, ada kemungkinan terdpat hal-hal yang menyimpang dari asumsi atau tidak terfikir sebelumnya. Pada tahap ini akan dijelaskan dengan alternative lain melalui referensi atau teori-teori lain. Alternatif ini akan sangat berguna pada bagian pembahasan, kesimpulan dan saran.

e. Menulis Hasil Penelitian

Penulisan data subjek yang telah berhasil dikumpulkan merupakan suatu hal yang membantu penulis unntuk memeriksa kembali apakah kesimpulan yang dibuat telah selesai. Dalam penelitian ini, penulisan yang dipakai adalah presentase data yang didapat yaitu, penulisan data-data hasil penelitian berdasarkan

wawancara mendalam dan observasi dengan subjek dan significant other. Proses dimulai dari data-data yang diperoleh dari subjek dan significant other, dibaca berulang kali sehingga penulis mengerti benar permasalahannya, kemudian dianalisis, sehingga didapat gambaran mengenai penghayatan pengalaman dari subjek. Selanjutnya dilakukan interpretasi secara keseluruhan, dimana di dalamnya mencakup keseluruhan kesimpulan dari hasil penelitian.

Bab 2

Landasan Teoretis

A. Acuan Teoretis

Bagian ini merupakan unsur yang paling penting di dalam penelitian, karena pada bagian ini peneliti mencoba menjelaskan fenomena yang sedang diamati dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan penelitiannya. Teori menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi dalam buku *Metode Penelitian Sosial* mengatakan, teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi dan preposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹

1. Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS (Voter turn-out)

Mengapa beberapa orang ikut memilih sementara yang lain tidak? Mengapa sebagian orang bersedia meluangkan waktu untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih dan menandatangani TPS sementara yang lain lebih suka berdagang atau meluangkan waktu bersama keluarga? Setelah melakukan penelitian di beberapa negara. Lipset membagi atau mengelompokkan beberapa faktor yang mempengaruhi kehadiran atau ketidakhadiran pemilih kedalam empat kategori.

Pertama, keterkaitan dengan kebijakan pemerintah. Para pemilih yang tidak mempunyai keterkaitan cukup dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat ketidakhadiran dalam pemilu. *Kedua*, akses terhadap informasi. Para pemilih yang kurang mempunyai akses terhadap informasi cenderung tinggi tingkat ketidakhadirannya. *Ketiga*, Adanya tekanan kelompok-kelompok tertentu, seperti kelompok Golput misalnya. Terakhir, tekanan menyilang (cross-pressures), seperti orangtua memilih PPP mertua memilih Golkar.²

Namun, Konsep Cross-Pressures sebenarnya tidak hanya sebatas

¹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : LP3ES, 1998, hal 37.

² Sherman and Kolker. 1987

dalam pengertian diatas. Seorang pemilih yang mempunyai status “menyilang” juga termasuk dalam konsep ini. Misalnya, seorang pemilih yang tingkat pendidikannya tinggi sementara tingkat pendapatannya rendah: seorang pemilih yang berlatar belakang Islam santri dari keluarga PPP namun bekerja sebagai pegawai negeri, dan sebagainya.³

Jika mengamati karakteristik pendukung Golkar dan Faktor-faktor yang melatarbelakanginya, tampaknya kategori-kategori Lipset diatas tidak dapat menjelaskan secara memuaskan. Misalnya, bagaimana menjelaskan para pendukung Golput yang umumnya berasal dari kalangan muda terpelajar. Ini berarti kontran dengan data yang ditemukan oleh Lipset, bahwa tingginya tingkat pendidikan berkorelasi positif dengan tingginya tingkat kehadiran dalam pemilu

Untuk itu, agaknya diperlukan Variabel-Variabel tambahan untuk menjelaskan Fenomena non-Voting secara memuaskan. Salah satu alternatif yang bisa ditawarkan adalah dengan menghubungkan Variabel-variabel yang lebih bersifat Psikologis. Penjelasan-penjelasan psikologis, dalam banyak kasus dan dibanyak negara seringkali lebih dapat atau setidaknya melengkapi Penjelasan-penjelasan Lipset diatas. Penjelasan psikologis ini pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu penjelasan-penjelasan yang lebih menitik beratkan faktor kepribadian-individual dan penjelasan-penjelasan yang lebih menitik beratkan orientasi kepribadian.⁴

Penjelasan faktor kepribadian-individual melihat bahwa perilaku non-voting disebabkan oleh kepribadaian yang tidak toleran, otoriter, tidak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi,, dan semacamnya. Orang yang tidak mempunyai kepribadaian tidak toleran atau tidak acuh cenderung untuk tidak memilih. Sebab, apa yang diperjuangkan kandidat atau partai politik tidak selalu sejalan dengan kepentingan perorangan secara langsung, karena tidak berhubungan dengan kepentingannya.

Sementara itu, penjelasan psikologis yang lebih menitik beratkan

³ Milbrath, 1977

⁴ *Ibid*

faktor orientasi kepribadian melihat bahwa perilaku *non-voting* disebabkan oleh orientasi kepribadian pemilih yang menunjukkan karakteristik apatis, anomi, dan alienasi. Perasaan apatis sebenarnya merupakan jelmaan atau pengembangan lebih jauh dari kepribadian otoriter. Yang secara sederhana ditandai dengan tiadanya minat terhadap persoalan-persoalan politik. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya sosialisasi atau rangsangan (stimulus) politik, atau adanya perasaan (anggapan) bahwa aktivis politik tidak menyebabkan perasaan kepuasan atau hasil secara langsung.

Anomi menunjukkan pada perasaan tidak berguna. Mereka melihat bahwa aktifitas politik sebagai sesuatu yang sia-sia karena mereka merasa tidak mungkin mempengaruhi peristiwa atau kebijaksanaan politik. Bagi para pemilih semacam ini, memilih atau tidak memilih tidak mempunyai pengaruh apa-apa, karena keputusan-keputusan politik sering kali berada di luar kontrol para pemilih. Sebab, para terpilih biasanya menggunakan logika-logikanya sendiri dalam mengambil berbagai keputusan politik, dan dalam banyak hal mereka berada jauh di luar jangkauan para pemilih. Perasaan *powerlessness* inilah yang disebut sebagai anomi.

Sedangkan alienasi berada di luar apatis dan anomi. Alienasi merupakan perasaan keteransingan secara aktif. Pemerintah dianggap tidak mempunyai pengaruh --terutama pengaruh baik—terhadap kehidupan seseorang. Bahkan pemerintah dianggap sebagai sesuatu yang mempunyai konsekuensi jahat terhadap kehidupan manusia. Jika perasaan alienasi ini memuncak, mungkin akan mengambil bentuk alternative aksi politik. Seperti memalui kerusuhan, kekacauan, demonstrasi dan sebagainya.⁵

Sementara itu Einsinger dan kawan-kawan mengidentifikasi tiga faktor yang mempengaruhi kehadiran atau ketidakhadiran pemilih. *Pertama*, bagaimana para pemilih didaftar dan dimobilisasi pada saat pemilu. *Kedua*, hubungan persaingan partai dan kehadiran dalam pemilu. *Ketiga*, variasi kecendrungan pemilih diantara kelompok.⁶ Jika cara pendaftaran terlalu menyusahakan pemilih, ada kecendrungan tingkat kehadiran pemilih cukup tinggi. Di Amerika Serikat misalnya, hanya pemilih yang tingkat

⁵ *Ibid*

⁶ (Einsinger, 1990)

pendidikannya tinggi dan pendapatannya besar yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendaftarkan diri.⁷

Variabel lain yang digunakan menjelaskan perilaku golput adalah variabel kepercayaan politik. Namun, menjelaskan golput dengan konsep kepercayaan selalu mengandung pengertian ganda. Pertama, golput dapat diinterpretasi sebagai ekspresi atas perasaan keterasingan (alienasi). Pada sisi lain, golput juga dapat diinterpretasi sebagai ekspresi kepercayaan yang tinggi. Misalnya, ada bukti kuat bahwa partisipasi dalam sistem politik meningkat pada saat terjadi krisis. Dengan begitu, golput menandakan bahwa mereka puas dengan sistem politik yang ada.⁸ Dalam konteks semacam ini, golput merupakan pertanda kepercayaan pada sistem politik yang ada. Susan Welch dkk. Menulis, “nonvoting adalah bentuk pemberian ijin kepada pemerintah untuk melakukan apa yang dikehendakinya”.⁹

Disamping itu, ilmuwan politik seringkali memahami golput dari variabel status sosial ekonomi. Setidaknya ada tiga indikator yang biasa digunakan mengukur variabel status sosial ekonomi. Yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan pekerjaan. Lazimnya, variabel status sosial ekonomi digunakan untuk menjelaskan perilaku pemilih. Namun, dengan menggunakan proposisi yang berlawanan. Pada saat yang sama variabel tersebut sebenarnya juga dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku non voting atau golput.

Tesis utama yang dipakai adalah, tingkat ketidakhadiran pemilih berkorelasi secara signifikan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan. Tesis ini sebenarnya bermula dari banyaknya temuan penelitian tentang perilaku memilih. Yang menunjukkan tingkat kehadiran pemilih dari pemilih yang berpendidikan dan berpenghasilan tinggi. Hasil temuan Verba dan Nie menyimpulkan, “*the best know about turnout is than citizen higher social n economic status parcitipate more in politic...*”.¹⁰

Ada beberapa alasan mengapa tingkat status sosial ekonomi

⁷ Lowi and Ginsbert, 1990

⁸ Gamson, 1971

⁹ Welch, 1991.

¹⁰ Verba and Nie, 1977

berkoresasi dengan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih. *Pertama*, tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut. Disamping memungkinkan seseorang menguasai aspek-aspek birokrasi, baik pada saat pendaftaran maupun pemilihan. *Kedua*, pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi warga. *Ketiga*, pendapatan yang tinggi memudahkan orang untuk menanggung beban finansial akibat keterlibatannya dalam proses pemilu.¹¹

2. Partisipasi Politik

Digunakannya teori partisipasi politik dalam penelitian ini adalah karena, tingkat partisipasi politik adalah faktor yang menentukan apakah Pemilu ataupun Pilkada yang berlangsung berhasil atau tidak, semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih, maka tingkat keberhasilan Pemilu ataupun Pilkada semakin tinggi.

Dalam analisa Modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan Negara- negara berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik hanya memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, akan tetapi dengan berkembangnya demokrasi, banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin berpartisipasi dalam bidang politik khususnya dalam hal pengambilan keputusan- keputusan mengena-mengenai kebijakan umum.¹²

Secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik.

Herbert McClosky berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan- kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan

¹¹ wolfinger, 1980

¹² Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2008. Hal 367

kebijakan umum.¹³

Berikut ini dikemukakan sejumlah “rambu-rambu” partisipasi politik:¹⁴

Pertama, partisipasi politik berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga Negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. Karena sikap dan orientasi tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya.

Kedua, kegiatan tersebut diarahkan untuk mempengaruhi perilaku selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Seperti mengajukan alternative kebijakan umum, dan kegiatan mendukung atau menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah.

Ketiga, kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik.

Keempat, kegiatan mempengaruhi kebijakan pemerintah secara langsung yaitu mempengaruhi pemerintah dengan menggunakan perantara yang dapat meyakinkan pemerintah.

Kelima, mempengaruhi pemerintah melalui prosedur yang wajar dan tanpa kekerasan seperti ikut memilih dalam pemilu, mengajukan petisi, bertatap muka, dan menulis surat atau dengan prosedur yang tidak wajar seperti kekerasan, demonstrasi, mogok, kideta, revolusi, dll.

Di Negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu, tingginya tingkat partisipasi juga menunjukkan bahwa rezim yang sedang berkuasa memiliki keabsahan yang tinggi. Dan sebaliknya, rendahnya partisipasi politik di suatu Negara dianggap kurang baik karena menunjukkan rendahnya perhatian warga terhadap masalah politik, selain itu rendahnya partisipasi politik juga menunjukkan lemahnya legitimasi dari rezim yang sedang berkuasa.

¹³ Miriam Budiarjo *ibid.*,

¹⁴ Ramlan Surbakti, *Op.cit.*, hal. 141

Partisipasi sebagai suatu bentuk kegiatan dibedakan atas dua bagian, yaitu:¹⁵

- a. *Partisipasi aktif*, yaitu kegiatan yang berorientasi pada output dan input politik. Yang termasuk dalam partisipasi aktif adalah, mengajukan usul mengenai suatu kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan.
- b. *Partisipasi pasif*, yaitu kegiatan yang hanya berorientasi pada output politik. Pada masyarakat yang termasuk kedalam jenis partisipasi ini hanya menuruti segala kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa mengajukan kritik dan usulan perbaikan.

Kemudian terdapat masyarakat yang tidak termasuk kedalam kedua kategori ini, yaitu masyarakat yang menganggap telah terjadinya penyimpangan sistem politik dari apa yang telah mereka cita-citakan. Kelompok tersebut disebut apatis (golput).

Kategori partisipasi politik menurut *Milbrath* adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan *Gladiator* meliputi:
 - 1) Memegang jabatan publik atau partai
 - 2) Menjadi calon pejabat
 - 3) Menghimpun dana politik
 - 4) Menjadi anggota aktif suatu partai
 - 5) Menyisihkan waktu untuk kampanye politik
- b. Kegiatan transisi meliputi
 - 1) Mengikuti rapat atau pawai politik
 - 2) Memberi dukungan dana partai atau calon
 - 3) Jumpa pejabat publik atau pemimpin politik
- c. Kegiatan *monoton* meliputi :
 - 1) Memakai symbol/identitas partai/organisasi politik
 - 2) Mengajak orang untuk memilih
 - 3) Penyelenggarakan diskusi politik

¹⁵ Ramlan Surbakti, *Ibid.*, hal 143

- 4) Memberi suara
- d. Kegiatan apatis/masa bodoh

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang adalah :

- 1) Kesadaran politik, yaitu kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.
- 2) Kepercayaan politik, yaitu sikap dan kepercayaan orang tersebut terhadap pemimpinnya.

Berdasarkan dua faktor tersebut, terdapat empat tipe partisipasi politik yaitu:¹⁶

- a) Partisipasi politik aktif jika memiliki kesadaran dan kepercayaan politik yang tinggi.
- b) Partisipasi politik apatis jika memiliki kesadaran dan kepercayaan politik yang rendah.
- c) Partisipasi politik pasif jika memiliki kesadaran politik rendah, sedangkan kepercayaan politiknya tinggi.
- d) Partisipasi politik militant radikal jika memiliki kesadaran politik tinggi, sedangkan kepercayaan politiknya rendah.

3. Perilaku Pemilih

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para konsestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada konsestan yang bersangkutan.¹⁷

Dinyatakan sebagai pemilih dalam Pilkada yaitu mereka yang telah terdaftar sebagai peserta pemilih oleh petugas pendata peserta pemilih. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konsituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstiuen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik dan seorang pemimpin.¹⁸

Perilaku pemilih dapat ditujukan dalam memberikan suara dan menentukan siapa yang akan dipilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil

¹⁶ Ramlan surbakti, *ibid.*, hal 144

¹⁷ Firmanzah, *Marketing Politik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2007. Hal. 102.

¹⁸ *Ibid.*, hal 105.

Kepala Daerah dalam Pilkada secara langsung. Pemberian suara atau *votting* secara umum dapat diartikan sebagai; “sebagai sebuah proses dimana seorang anggota dalam suatu kelompok menyatakan pendapatnya dan ikut menentukan konsensus diantara anggota kelompok seorang pejabat maupun keputusan yang diambil”.¹⁹

Pemberian suara dalam Pilkada secara langsung diwujudkan dengan memberikan suara pada pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukungnya atau ditujukan dengan perilaku masyarakat dalam memilih pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Adapun perilaku pemilih menurut Surbakti adalah : “Aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (*to vote or not to vote*) didalam suatu pemilihan umum (Pilkada secara langsung-*pen*. Bila *voters* memutuskan untuk memilih (*to vote*) maka *voters* akan memilih atau mendukung kandidat tertentu”.²⁰

Keputusan untuk memberikan dukungan dan suara tidak akan terjadi apabila tidak terdapat *loyalitas* pemilih yang cukup tinggi kepada calon pemimpin jagoannya. Begitu juga sebaliknya, pemilih tidak akan memberikan suaranya kalau mereka menganggap bahwa sebuah partai atau calon pemimpin tidak loyal serta tidak konsisten dengan janji dan harapan yang telah mereka berikan.

Perilaku pemilih juga sarat dengan *ideology* antara pemilih dengan partai politik atau kontestan pemilu. Masing-masing kontestan membawa ideology yang saling berinteraksi. Selama periode kampanye pemilu, muncul kristalisasi dan pengelompokkan antara ideology yang dibawa kontestan. Masyarakat akan mengelompokkan dirinya kepada kontestan yang memiliki ideology sama dibawa dengan yang mereka anut sekaligus juga menjauhkan diri dari ideology yang berseberangan dengan mereka.

Perilaku pemilih dapat dianalisis dengan tiga pendekatan yaitu :²¹

¹⁹ Gosnel F Horal. Log.cit. hal 32

²⁰ Ramlan Surbakti. *Partai, Pemilu dan Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1997.hal 170

²¹ Muhammad Asfar. *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004* .Pustaka Eureka.

a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis sebenarnya berasal dari Eropa, kemudian di Amerika dan pendidikan Eropa. Karena itu, Flanagan menyebutnya sebagai model sosiologi politik Eropa. David Denver, ketika menggunakan pendekatan ini untuk menjelaskan perilaku memilih masyarakat Inggris, menyebut model ini sebagai *social determinism approach*.

Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku memilih seseorang. Karakteristik sosial (seperti pekerjaan, pendidikan dsb) dan karakteristik atau latar belakang sosiologis (seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur dsb) merupakan faktor penting dalam menentukan pilihan politik. Pendek kata, pengelompokan sosial seperti umur (tua-muda); jenis kelamin (laki-perempuan); agama dan sebagainya dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi- organisasi keagamaan, organisasi-organisasi profesi; maupun pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan, ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya., merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku politik seseorang, karena kelompok-kelompok inilah yang mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang.

b. Pendekatan Psikologis

Pendekatan sosiologis berkembang di Amerika Serikat berasal dari Eropa Barat, pendekatan Psikologis merupakan fenomena Amerika Serikat karena dikembangkan sepenuhnya oleh Amerika Serikat melalui *Survey Research Centre* di Universitas Michigan. Oleh karena itu, pendekatan ini juga disebut sebagai Mazhab Michigan . Pelopor utama pendekatan ini adalah August Campbell.

Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi- terutama konsep sosialisasi dan sikap untuk menjelaskan

perilaku pemilih. Variabel-variabel itu tidak dapat dihubungkan dengan perilaku memilih kalau ada proses sosialisasi. Oleh karena itu, menurut pendekatan ini sosialisasilah sebenarnya yang menentukan perilaku memilih (politik) seseorang.

Penganut pendekatan ini menjelaskan sikap seseorang-sebagai refleksi dari kepribadian seseorang-merupakan variabel yang cukup menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat.

c. Pendekatan Rasional

Penggunaan pendekatan rasional dalam menjelaskan perilaku pemilih oleh ilmuwan politik sebenarnya diadaptasi dari ilmu ekonomi. Mereka melihat adanya analogi antara pasar (ekonomi) dan perilaku memilih (politik). Apabila secara ekonomi masyarakat dapat bertindak secara rasional, yaitu menekan ongkos sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka dalam perilaku politikpun maka masyarakat akan dapat bertindak secara rasional, yakni memberikan suara ke OPP yang dianggap mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan menekan kerugian.

4. Orientasi Pemilih²²

a. *Orientasi Policy-Problem Solving*

Ketika pemilih menilai seorang kontestan dari kacamata “policy-problem- solving” yang terpenting bagi mereka adalah sejauh mana kontestan mampu menawarkan program kerja atau solusi bagi suatu permasalahan yang ada. pemilih akan cenderung secara objektif memilih partai politik atau kontestan yang memiliki kepekaan terhadap masalah nasional (daerah) dan kejelasan-kejelasan program kerja partai-politik atau kontestan pemilu yang arah kebijakannya tidak jelas akan cenderung tidak dipilih.

²² Agung Wibawanto. *Menangkan Hati dan Pikiran Rakyat*. Yogyakarta: 2006, hal 137-144

b. *Orientasi Ideologi*

Pemilih yang cenderung mementingkan ideology suatu partai atau kontestan, akan mementingkan ikatan “ideologi” suatu partai atau kontestan, akan menekankan aspek-aspek subjektivitas seperti kedekatan nilai, budaya, norma, emosi dan psikografis. Semakin dekat kesamaan partai atau kontestan pemilu, pemilih jenis ini akan cenderung memberikan suaranya ke partai atau kontestan tersebut.

5. Jenis-Jenis Pemilih

a. Pemilih Rasional

Pemilih jutamakan kemampuan ini memiliki orientasi yang tinggi terhadap *policy-Problem-Solving* dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau calon peserta pemilu dengan program kerjanya, mereka melihat program kerja tersebut melalui kinerja partai atau kontestan dimasa lampau, dan tawaran program yang ditawarkan sang calon atau partai politik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang terjadi.

Pemilih jenis ini memiliki cirri khas yang tidak begitu mementingkan ikatan Ideologi kepada suatu partai politik atau seorang kontestan. Hal yang terpenting bagi pemilih jenis ini adalah apa yang bisa (dan yang telah) dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan pemilu.

b. Pemilih Kritis

Proses untuk menjadi jenis pemilih ini bisa terjadi melalui 2 hal yaitu *pertama*, jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai atau kontestan pemilu mana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan. *Kedua*, bisa juga terjadi sebaliknya di mana pemilih tertarik dulu dengan program kerja yang ditawarkan sebuah paartai/kontestan baru kemudian mencoba mamahami nilai-nilai dan faham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan. Pemilih jenis ini adalah pemilih yang kritis, artinya

mereka akan selalu menganalisis kaitan antara sistem partai ideology dengan kebijakan yang dibuat.

c. Pemilih Tradisional

Pemilih jenis ini memiliki orientasi ideology yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik atau kontestan pemilu. Kebijakan seperti yang berhubungan dengan masalah ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dll, dianggap sebagai prioritas kedua. Pemilih jenis ini sangat mudah dimobilisasi selama masa kampanye, pemilih jenis ini memiliki loyalitas yang sangat tinggi. Mereka menganggap apa saja yang dikatakan oleh seorang kontestan pemilu atau partai politik yang merupakan suatu kebenaran yang tidak bisa ditawar lagi.

d. Pemilih Skepsis

Pemilih jenis ini tidak memiliki orientasi ideology yang cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau kontestan pemilu, pemilih ini juga tidak menjadikan sebuah kebijakan menjadi suatu hal penting. Walaupun mereka berpartisipasi dalam pemilu, biasanya mereka melakukannya secara acak atau random. Mereka berkeyakinan bahwa siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilu, hasilnya sama saja, tidak ada perubahan yang berarti yang dapat terbagi bagi kondisi Daerah/Negara.

Setelah melihat beberapa jenis pemilih, para kontestan pemilu nanti harus bisa memahami segala jenis pemilih dan berusaha merebut suara pemilih tersebut, yaitu tentunya melalui kampanye. Karena dengan memahami jenis pemilih yang ada, kemungkinan untuk memenangkan pemilu menjadi semakin kuat. Mereka harus mampu meraih suara dari setiap jenis pemilih yang ada. Untuk itu mereka pada umumnya membutuhkan dukungan dari tokoh-tokoh ataupun hal-hal yang membuat setiap jenis pemilih di atas mau mendukung mereka dalam pemilu (Pilkada) nanti.

6. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Mulai bulan juni 2005, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, maupun Walikota/Wakil Walikota, dipilih secara langsung oleh rakyat.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 jo Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.6/2005 tentang Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang pilkadasung tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkada. Dalam pasal 56 ayat (1) disebutkan :

“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.”

Dipilihnya sistem pilkada langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri. Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendimanisir kehidupan demokrasi di Tingkat lokal. Keberhasilan pilkada langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasioanalitas rakyat sendiri.²³

Dengan lahirnya UU No.32/2004 dan PP No. 6/2005, sebagaimana disebutkan dimuka, akhirnya pilkada langsung merupakan keputusan hukum yang harus dilaksanakan. Dengan pemilihan langsung, yang menggunakan asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, pilkada langsung layak disebut sebagai sistem rekrutmen pejabat publik yang hampir memenuhi parameter demokratis.²⁴

²³ Joko J. Prihatmoko. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar. 2005. Hal 1-2.

²⁴ Ibid, hal 20

Bab 3

Hasil Penelitian

A. Sekilas Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong dengan terletak pada posisi 102°19'-102°57' Bujur Timur dan 2°22'07"- 3°31' Lintang Selatan. Batas-batas administratif Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Lebong
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kepahiang
3. Sebelah Timur : Kabupaten Musi Rawas
4. Sebelah Barat : Kabupaten Bengkulu Utara

Ibukota Kabupaten Rejang Lebong terletak di Kota Curup. Jarak Kota Curup dari beberapa kota disekitar antara lain:

1. Bengkulu : 85 km
2. Lubuk Linggau : 55 km
3. Palembang : 484 km
4. Tanjung Karang : 774 km

Secara topografi, Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah yang berbukit-bukit, terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 100 – > 1000 m dpl. Secara umum kondisi fisik Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut: Kelerengan: datar sampai bergelombang, Jenis Tanah: Andosol, Regosol, Podsolik, Latasol dan Alluvial, Tekstur Tanah: sedang, lempung dan sedikit berpasir dengan pH tanah 4,5 –7,5 , Kedalaman efektif Tanah : sebagian besar terdiri atas kedalaman 60 cm hingga lebih dari 90 cm, sebagian terdapat erosi ringan dengan tingkat pengikisan 0 – 10 %. Curah hujan rata-rata 233,75 mm/bulan, dengan jumlah hari hujan rata rata 14,6 hari/bulan pada musim kemarau dan 23,2 hari/bulan pada musim penghujan. Sementara suhu normal rata-rata 17,73 0C – 30,940C dengan kelembaban nisbi rata-rata 85,5 %. Suhu udara maksimum pada tahun 2003 terjadi pada bulan Juni dan Oktober yaitu 32

derajat Celcius dan suhu udara minimum terjadi pada bulan Juli yaitu 16,2 derajat Celcius.

Kabupaten Rejang Lebong terdiri atas 15 kecamatan sbb :

1. Padang Ulak Tanding
2. Sindang Beliti Ilir
3. Kota Padang
4. Selupu Rejang
5. Bermani Ulu Raya
6. Sindang Kelingi
7. Sindang Beliti Ulu
8. Bermani Ulu
9. Binduriang
10. Sindang Dataran
11. Curup
12. Curup Selatan
13. Curup Timur
14. Curup Utara
15. Curup Tengah

B. Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Rejang Lebong

Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Rejanglebong, Bengkulu, hasil pencermatan saat ini sebanyak 197.086 pemilih atau mengalami pengurangan 480 pemilih dari DPT 11 September 2013 lalu. Jumlah DPT yang ditetapkan 11 September lalu yakni sebanyak 197.566 pemilih yang tersebar dalam 15 kecamatan, setelah dilakukan pencermatan DPT di setiap kecamatan terjadi pengurangan pemilih sebanyak 480 pemilih sehingga jumlah DPT akhir Kabupaten Rejanglebong menjadi 197.086 pemilih.

Penurunan jumlah DPT daerah tersebut, diketahui setelah pihaknya melakukan pencermatan DPT di setiap kecamatan di daerah itu terhitung sejak 7 - 12 Oktober 2013 lalu, selanjutnya DPT hasil pencermatan ini pada 13 Oktober 2013 telah ditetapkan sebagai DPT Pemilu 2014 yang digelar dalam rapat pleno penetapan DPT ulang.

Pengurangan jumlah DPT tersebut, akibat adanya pemilih yang pindah, kemudian data pemilih ganda maupun pemilih yang sudah meninggal dunia serta pemilih yang belum cukup umur.

Pencermatan DPT itu selain melibatkan petugas dari KPU juga pihak panitia pemilihan kecamatan (PPK) masing-masing daerah serta pihak Panwaslu Kabupaten Rejanglebong. Data dari hasil pencermatan itu diketahui dari 15 kecamatan yang ada terdapat dua kecamatan yang DPT-nya mengalami penambahan yakni di Kecamatan Curup bertambah 140 pemilih dari 19.454 pemilih menjadi 19.594 pemilih. Kemudian di Kecamatan Sindang Beliti Ulu terjadi penambahan 16 pemilih dari 9.118 menjadi 9.134 pemilih.

Sebaliknya DPT dalam 13 kecamatan lainnya justru mengalami penurunan antara lain Kecamatan Curup Tengah dengan jumlah mata pilih tetap 25.918 pemilih jumlah ini berkurang dari DPT sebelumnya sebanyak 26.016. Selanjutnya Kecamatan Curup Selatan dari 15.069 pemilih menjadi 15.001 pemilih. Kecamatan Curup Utara dari 12.379 pemilih menjadi 12.350 pemilih. Kemudian Kecamatan Curup Timur dari 16.981 menjadi 16.977 pemilih.

Kecamatan Bermani Ulu dengan mata pilih 9.387 dari jumlah sebelumnya sebanyak 9.412 pemilih. Kecamatan Selupu Rejang 21.437 pemilih dari jumlah sebelumnya 21.496 pemilih. Kecamatan Sindang Kelingi dari mata pilih sebanyak 10.912 pemilih menjadi 10.896 pemilih. Kecamatan Sindang Dataran sebanyak 9.214 pemilih dari jumlah sebelumnya 9.242 mata pilih.

Kecamatan Binduriang dari 7.996 pemilih menjadi 7.992 pemilih, kemudian Kecamatan Sindang Beliti Ilir dari 6.746 pemilih menjadi 6.661 pemilih, Kecamatan Padang Ulak Tanding, dari 14.676 pemilih menjadi 14.586 pemilih, Kecamatan Kota Padang dari mata pilih sebanyak 10.198 pemilih menjadi 10.072 pemilih serta DPT Kecamatan Bermani Ulu Raya sebanyak 7.872 pemilih menjadi 7.847 pemilih.

C. Tabulasi Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang diolah dari angket yang disebarakan secara

random, maka berikut ini hasil entri data dalam tabulasi:

1. Tabulasi Kecenderungan Pemilih Mendatangi TPS

Tabulasi di bawah ini dibagi dalam varian variabel umur, agama, pendidikan, pekerjaan, dan tempat tinggal. Dengan jumlah responden atau sampel pemilih 9.095 orang yang dipilih secara acak, maka didapat sebaran kecenderungan mendatangi TPS, tidak mendatangi TPS, dan ragu-ragu sebagai berikut:

DATA RESPONDEN	RINCIAN	Mendatangi TPS		
		YA	TIDAK	RAGU-RAGU
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	2.091 (27.0%)	331 (3.6%)	58 (0.6%)
	PEREMPUAN	6.539 (72.7%)	54 (0.5%)	22 (0.2%)
UMUR	17 - 24 TAHUN	2.150 (23.6%)	170 (1.8%)	26 (0.2%)
	25 - 35 TAHUN	2.108 (23.1%)	146 (1.6%)	29 (0.3%)
	36 - 45 TAHUN	2.802 (30.8%)	49 (0.5%)	18 (0.2%)
	46 KEATAS	1.570 (17.2%)	20 (0.2%)	7 (0.06%)
AGAMA	ISLAM	8.630 (94.8%)	385 (4.2)	80 (0.8%)
	KRISTEN	-		
	BUNDA	-		
	HINDU	-		
PENDIDIKAN	SD	1.302 (14.3%)	63 (0.6%)	2 (0.02%)
	SMP	2.893 (31.8%)	52 (0.5%)	15 (0.2%)
	SMA	4.180 (45.9%)	133 (1.4%)	48 (0.5%)
	Sarjana	255 (2.8%)	137 (1.5%)	15 (0.2%)
PEKERJAAN	PNS	370 (4.0%)	21 (0.2%)	0
	PETANI	6.364 (69.9%)	159 (1.7%)	56 (0.6%)
	PEDAGANG	70 (0.7%)	9 (0.09%)	1 (0.01%)
	SWASTA	1.245 (13.6%)	42 (0.4%)	4 (0.04%)
	LAIN-LAIN	581 (6.3%)	154 (1.6%)	19 (0.01%)
ALAMAT	KOTA	2.015 (22.1%)	178 (1.9%)	14 (0.1%)
	DESA	6.615 (72.7%)	207 (2.2%)	66 (0.7%)

Terlihat dari 9.095 responden yang menjadi sampel penelitian ini, maka 94.8% punya kecendrungan mendatangi TPS, 4.2% punya kecendrungan tidak mendatangi TPS, sedangn 0.8% masi menyatakan ragu-ragu atau belum memastikan datang atau tidak ke TPS pada saat Pemilukada nanti.

Angka tersebut menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat secara sadar untuk mendatangi TPS pada saat

Pemilukada nanti. Hal ini harus terus dijaga stabilitas kecenderungan sikap tersebut.

2. Tabulasi Kecenderungan Pemilih Mendatangi TPS dan Menggunakan Hak/Suaranya

Berdasarkan data pemilih 8.630 yang cenderung mendatangi TPS, ditanyakan tentang apakah menggunakan hak/suaranya pada Pilkada nanti, maka didapat sebaran data sebagai berikut:

DATA RESPONDEN	RINCIAN	Mendatangi TPS dan Menggunakan Hak/suaranya		
		YA	TIDAK	RAGU-RAGU
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	2.081 (27.0%)	2 (0.02%)	8 (0.08%)
	PEREMPUAN	6.539 (72.7%)		
UMUR	17 - 24 TAHUN	2.147 (23.6%)	1 (0.01%)	2 (0.02%)
	25 - 35 TAHUN	2.106 (23.1%)		2 (0.02%)
	36 - 45 TAHUN	2.799 (30.7%)		3 (0.03%)
	46 KEATAS	1.567 (17.2%)	2 (0.02%)	1 (0.02%)
AGAMA	ISLAM	8.619 (94.7%)	3 (0.03%)	8 (0.08%)
	KRISTEN	-		
	BUNDA	-		
	HINDU	-		
PENDIDIKAN	SD	1.301 (14.3%)		1 (0.01%)
	SMP	2.891 (31.7%)	1 (0.01%)	1 (0.01%)
	SMA	4.173 (45.8%)	2 (0.02%)	5 (0.05%)
	Sarjana	254 (2.7%)		1 (0.01%)
PEKERJAAN	PNS	370 (4.0%)		
	PETANI	6.359 (69.9%)	1 (0.01%)	4 (0.04%)
	PEDAGANG	70 (0.7%)		
	SWASTA	1.241 (13.6%)	1 (0.01%)	3 (0.03%)
	LAIN-LAIN	579 (6.3%)	1 (0.01%)	1 (0.01%)
ALAMAT	KOTA	2.004 (22.0%)	3 (0.03%)	8 (0.08%)
	DESA	6.615 (72.7%)		

Terlihat dari 8.630 responden yang menjadi sampel penelitian ini yang menyatakan kecenderungan untuk hadir di TPS, maka peneliti mengajukan pertanyaan apakah mereka menggunakan hak/suaranya maka 94.7% punya kecenderungan menggunakan hak/suaranya, 0.03% punya kecenderungan tidak menggunakan hak/suaranya,

sedangn 0.8% masi menyatakan ragu-ragu atau belum memastikan menggunakan hak/suaranya pada saat Pemilukada nanti.

Angka tersebut menunjukkan tingginya tingkat keinginan atas potensi masyarakat secara sadar untuk menggunakan hak/suaranya pada saat Pemilukada nanti. Hal ini harus terus dijaga stabilitas kecenderungan sikap tersebut.

3. Tabulasi Faktor-faktor Kecenderungan Pemilih Mendatangi TPS dan Menggunakan Hak/Suaranya

1.	Sadar Akan Hak Sebagai warga Negara	4200 (46.1%)
2.	Karena sistem pemilihan yang sudah baik dan benar	208 (2.2%)
3.	Karena percaya dengan Panitia Pemilih	161 (1.7%)
4.	Karena memperoleh imbalan (Uang, Sembako, Jabatan)	43 (0.4%)
5.	Ajakan Keluarga, Teman, Tokoh Masyarakat	676 (7.4%)
6.	Karena yang lain datang ke TPS	468 (5.1%)
7.	Karena ajakan Tim Sukses	416 (4.5%)
8.	Karena Calon Kepala Daerah adalah anggota keluarga	325 (3.5%)
9.	Karena Yakin dan Percaya dengan Calon Kepala Daerah	122 (1.3%)
10.	Karena Calon Kepala Daerah adalah teman/kenal	550 (6.0%)
11.	Karena Calon Kepala Daerah sesuku atau seagama	890 (9.7%)
12.	Karena cuaca yang mendukung	653 (7.1%)
13.	Karena Panitia yang baik dan menyenangkan	665 (7.3%)
14.	Karena Posisi TPS yang baik dan dekat	911 (10.0%)
15.	Karena TPS yang dibuat Panitia menyenangkan	635 (6.9%)
16.	Karena diancam orang lain	142 (1.5%)

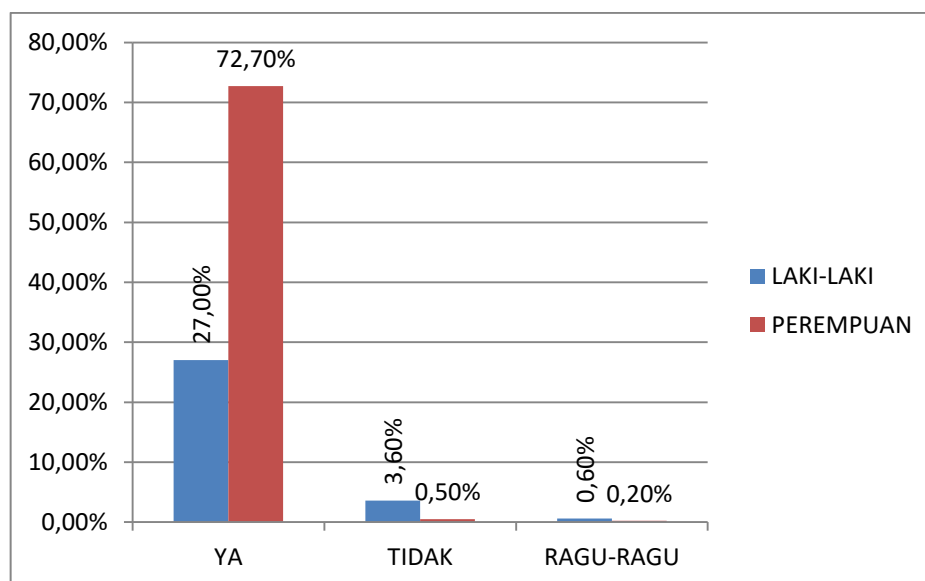
Bedasarkan angket yang disebar peneliti, dengan ketentuan responden boleh memilih lebih dari satu alasan mereka mendatangi TPS dan menggunakan hak/suaranya. Maka

D. Kecendrungan Pemilih Mendatangi TPS

Berdasarkan Tabulasi Hasil Penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kecenderungan pemilih mendatangi TPS berdasarkan jenis kelamin, adalah:
 - a. Laki-laki kecenderungan mendatangi TPS mencapai 27.0% tidak mendatangi TPS 3.6%, sedang masi ragu-ragu 0.6%.
 - b. Perempuan kecenderungan mendatangi TPS mencapai 72.7% tidak mendatangi TPS 0.5%, sedang masi ragu-ragu 0.2%.

**Grafik Persentase
Kecenderungan Mendatangi TPS Berdasarkan Jenis Kelamin**

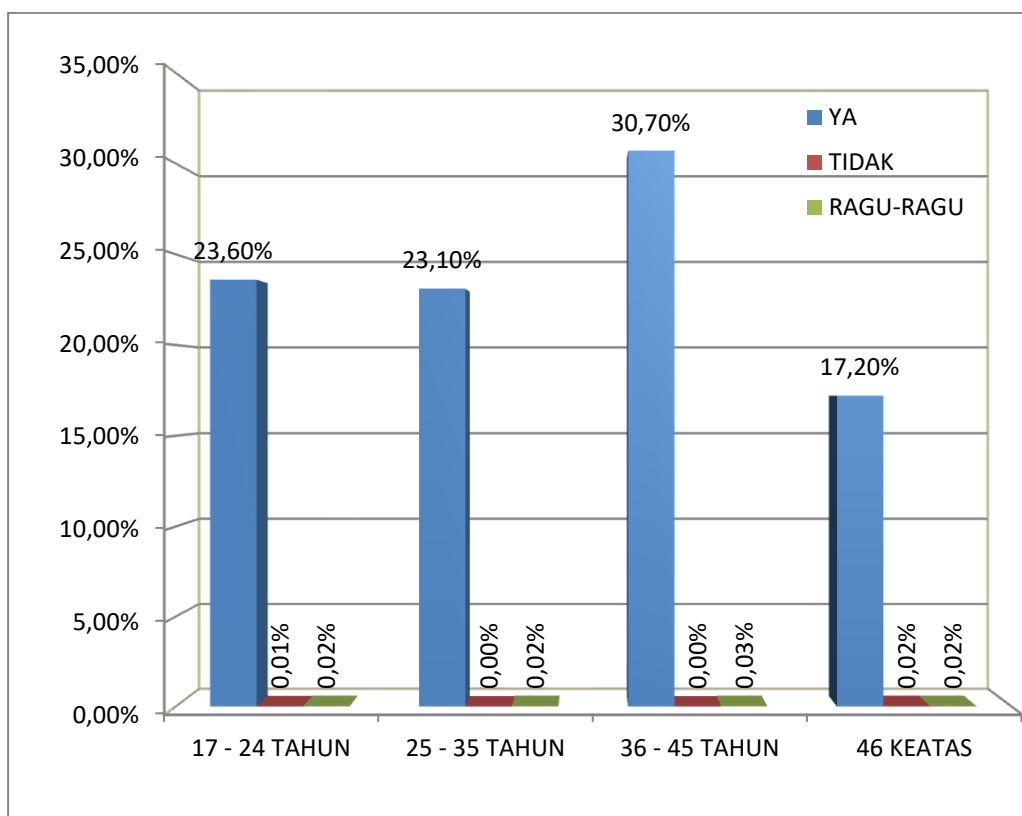


Berdasar data di atas terlihat bahwa kaum perempuan lebih stabil menentukan sikap untuk mendatangi TPS pada saat Pilkada nanti. Anomi menunjukkan pada perasaan tidak berguna. Mereka melihat bahwa aktifitas politik sebagai sesuatu yang sia-sia karena mereka merasa tidak mungkin mempengaruhi peristiwa atau kebijaksanaan politik. Bagi para pemilih semacam ini, memilih atau tidak memilih tidak mempunyai pengaruh apa-apa, karena keputusan-keputusan politik sering kali berada di luar kontrol para pemilih. Sebab, para terpilih biasanya menggunakan logika-logikanya sendiri dalam mengambil berbagai keputusan politik, dan dalam banyak hal mereka berada jauh di luar jangkauan para pemilih. Perasaan *powerlessness* inilah yang disebut sebagai anomie.

2. Kecenderungan pemilih mendatangi TPS berdasarkan tingkatan umur adalah:
 - a. Umur remaja menuju dewasa (17 tahun sampai dengan 24 tahun), kecenderungan mendatangi TPS mencapai (23.6%), tidak mendatangi TPS 0.01%, sedang masi ragu-ragu 0.02%.
 - b. Umur matang dewasa (25 tahun sampai dengan 35 tahun) kecenderungan mendatangi TPS mencapai 23.1% tidak mendatangi TPS 0%, sedang masi ragu-ragu 0.02%.

- c. Umur dewasa menuju tua (36 tahun sampai dengan 45 tahun) kecenderungan mendatangi TPS mencapai 30.7% tidak mendatangi TPS 0%, sedang masi ragu-ragu 0.03%.
- d. Umur tua (46 tahun ke atas) kecenderungan mendatangi TPS mencapai (17.2%) tidak mendatangi TPS 0.02%, sedang masi ragu-ragu 0.02%.

**Grafik Persentase
Kecendrungan Mendatangi TPS Berdasarkan Umur**



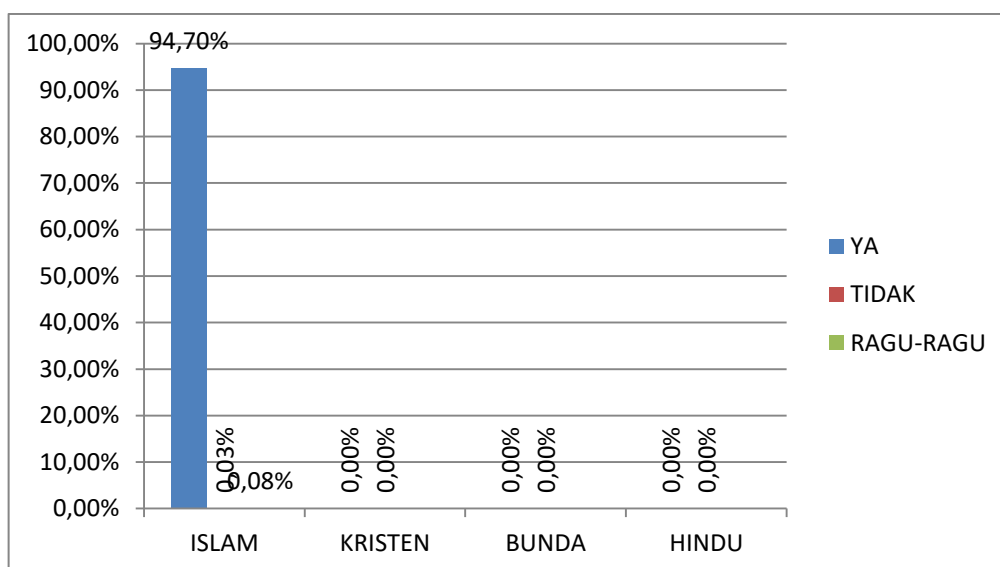
Berdasarkan data di atas terlihat bahwa tingkatan pemilih dewasa menuju tua memiliki tingkat kecenderungan mendatangi TPS lebih tinggi mencapai 30.7%, dibandingkan dengan remaja 23.6%, remaja menuju dewasa 23.1%, dan tua 17.2%. Ini menunjukkan bahwa faktor kematangan usia menentukan kematangan pilihan politik, sehingga memiliki potensi untuk mendatangi TPS atau berpartisipasi dalam pemilukada nanti.

Sedangkan usia remaja, remaja menuju dewasa menunjukan bahwa belum matang secara politik sehingga tingkat partisipasi

politiknya terhitung sedang. Namun kecenderungan tersebut dapat meningkat atau menurun sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk datang ke TPS, hal ini akan dibahas selanjutnya. Sedangkan usia tua memungkinkan pengaruh pikiran, fisik, dan pengalaman, sehingga kecenderungan untuk mendatangi TPS lebih rendah dari kelompok umur yang lain.

3. Kecenderungan pemilih mendatangi TPS berdasarkan Agama, adalah: karena semua sampel beragama Islam, kecenderungan mendatangi TPS mencapai 94.7% tidak mendatangi TPS 0.03%, sedang masi ragu-ragu 0.087%.

**Grafik Persentase
Kecendrungan Mendatangi TPS Berdasarkan Agama**



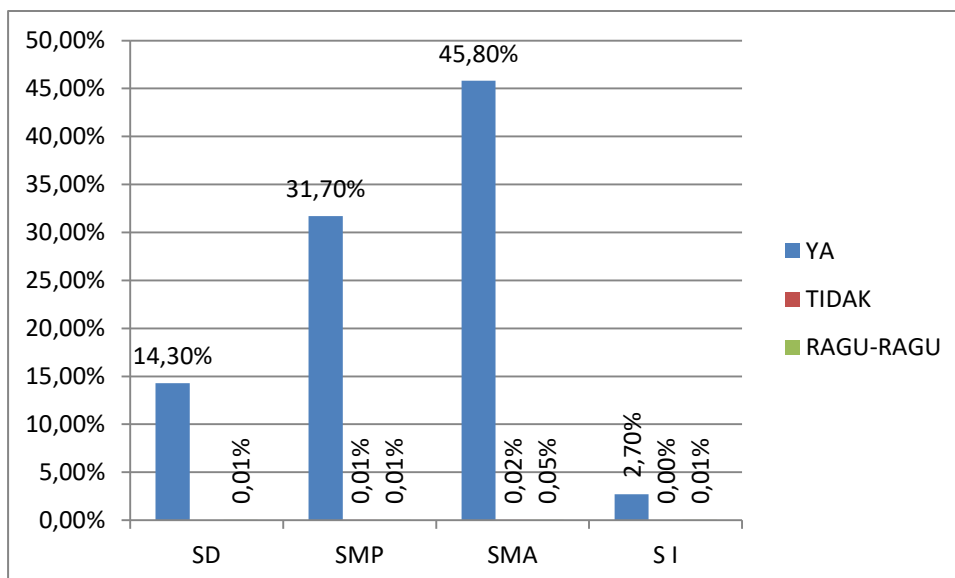
Variabel agama mengalami eror karena semua responden berasal dari satu agama sehingga tidak dapat menjadi perbandingan dengan agama-agama lain. Dengan pengertian bahwa faktor agama tidak dapat menjadi dasar untuk melihat kecenderungan mendatangi TPS berdasarkan dorongan kepercayaan atau agama. Namun demikian gambaran bahwa faktor agama juga sangat kuat mempengaruhi pandangan politik seseorang, dari gambaran angka kecenderungan mendatangi TPS cukup tinggi walaupun hanya terlihat dari satu kelompok agama.

4. Kecenderungan pemilih mendatangi TPS berdasarkan Pendidikan,

adalah:

- Tamatan Sekolah Dasar (SD) kecenderungan mendatangi TPS mencapai 14.3% tidak mendatangi TPS 0.6%, sedang masi ragu-ragu 0.02%.
- Tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) kecenderungan mendatangi TPS mencapai 31.8% tidak mendatangi TPS 0.5%, sedang masi ragu-ragu 0.2%.
- Tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) kecenderungan mendatangi TPS mencapai 45.9% tidak mendatangi TPS 1.4%, sedang masi ragu-ragu 0.5%.
- Tamatan Sarjana kecenderungan mendatangi TPS mencapai 2.8% tidak mendatangi TPS 1.5%, sedang masi ragu-ragu 0.2%.

**Grafik Persentase
Kecendrungan Mendatangi TPS Berdasarkan Pendidikan**



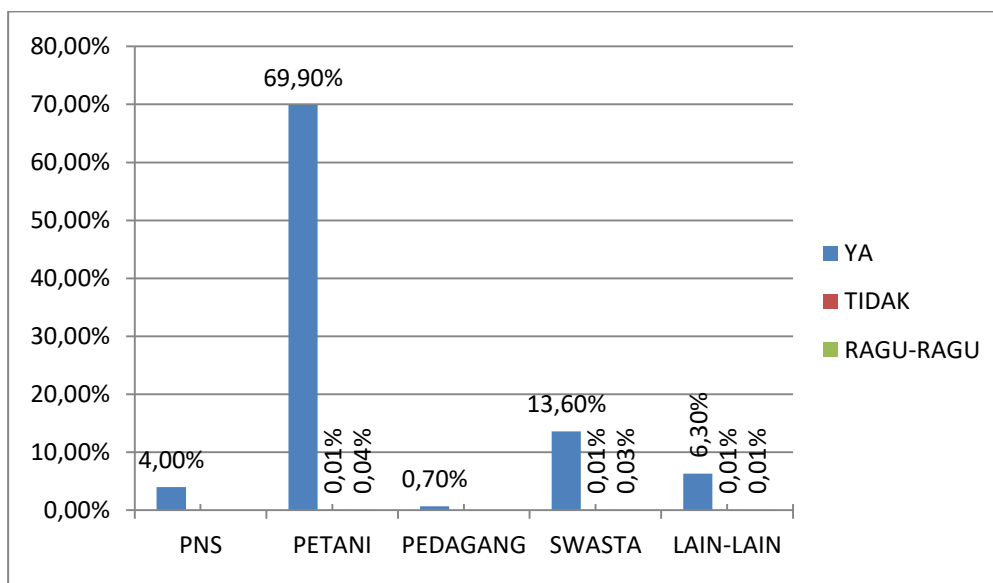
Variabel pendidikan memperlihatkan pengaruh yang cukup kuat terhadap kecendrungan pemilih mendatangi TPS, terlihat semakin tinggi pendidikan semakin besar angka partisipasi pemilih. Namun pada tingkat sarjana mengalami penurunan drastis dapat dijelaskan bahwa sarjana telah mengalami pengaruh pemikiran politik, sehingga mempengaruhi sikap dalam memilih.

Anomali ini memperlihatkan bahwa pendidikan menjadi pemilih

jenis ini adalah pemilih yang kritis, artinya mereka akan selalu menganalisis kaitan antara sistem pilkada dengan kebijakan yang dibuat. tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut. Disamping memungkinkan seseorang menguasai aspek-aspek birokrasi, baik pada saat pendaftaran maupun pemilihan

5. Kecenderungan pemilih mendatangi TPS berdasarkan Pekerjaan, adalah
 - a. Pegawai Negeri Sipil kecenderungan mendatangi TPS mencapai 4.0% tidak mendatangi TPS 0.2%, sedang masi ragu-ragu 0%.
 - b. Petani kecenderungan mendatangi TPS mencapai 69.9% tidak mendatangi TPS 1.7%, sedang masi ragu-ragu 0.6%.
 - c. Pedagang kecenderungan mendatangi TPS mencapai 0.7% tidak mendatangi TPS 0.09%, sedang masi ragu-ragu 0.01%.
 - d. Swasta kecenderungan mendatangi TPS mencapai 13.6% tidak mendatangi TPS 0.4%, sedang masi ragu-ragu 0.04%.
 - e. Pekerjaan lain kecenderungan mendatangi TPS mencapai 6.3% tidak mendatangi TPS 1.6%, sedang masi ragu-ragu 0.01%.

**Grafik Persentase
Kecendrungan Mendatangi TPS Berdasarkan Pekerjaan**



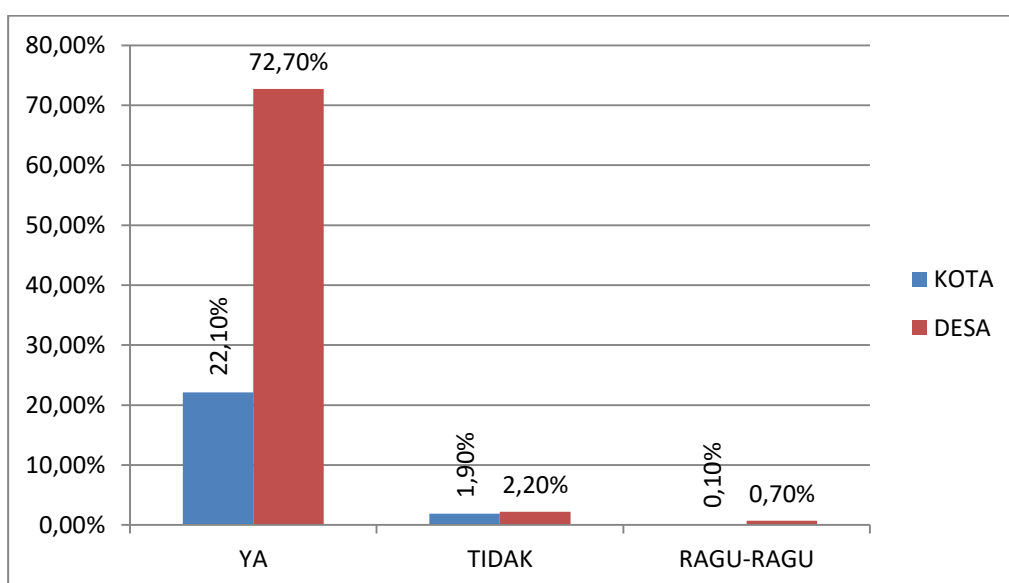
Berdasarkan data di atas terlihat mayoritas pekerjaan petani

mengungguli kecenderungan hadir di TPS, dibandingkan dengan pekerjaan swasta, pedagang, PNS, dan pekerjaan-pekerjaan lain. Walaupun dipengaruhi geografis wilayah Rejang Lebong mayoritas mata pencarian masyarakat merupakan petani. Namun data ini menunjukkan korelasi yang cukup besar bahwa pekerjaan mempengaruhi kecenderungan masyarakat untuk mendatangi TPS.

Ada beberapa alasan mengapa tingkat status sosial ekonomi berkorelasi dengan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih. *Pertama*, pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi warga. *Kedua*, pendapatan yang tinggi memudahkan orang untuk menanggung beban finansial akibat keterlibatannya dalam proses pemilu.

6. Kecenderungan pemilih mendatangi TPS berdasarkan Tempat Tinggal, adalah:
 - a. Pedesaan kecenderungan mendatangi TPS mencapai 22.1% tidak mendatangi TPS 1.9%, sedang masi ragu-ragu 0.1%.
 - b. Perkotaan kecenderungan mendatangi TPS mencapai 72.7% tidak mendatangi TPS 2.2%, sedang masi ragu-ragu 0.7%.

**Grafik Persentase
Kecenderungan Mendatangi TPS Berdasarkan Tempat Tinggal**



Berdasarkan tempat tinggal pemilih juga menentukan kecenderungan masyarakat mendatangi TPS, terlihat bahwa

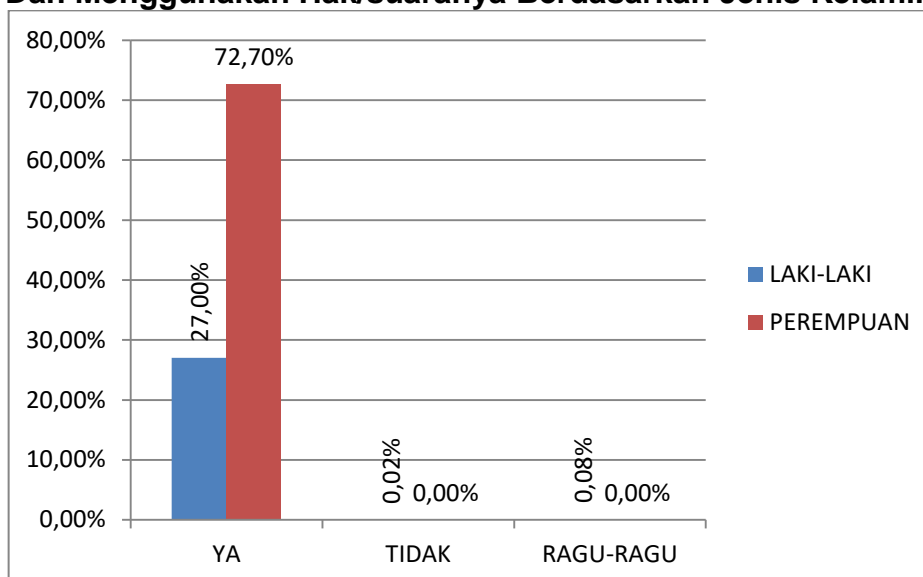
masyarakat yang tinggal di desa yang cenderung tidak banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar politik langsung lebih besar potensinya mendatangi TPS.

E. Kecenderungan Pemilih Mendatangi TPS Menggunakan Hak/Suaranya

Berdasarkan Tabulasi Hasil Penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kecenderungan pemilih mendatangi TPS menggunakan hak/suaranya berdasarkan jenis kelamin, adalah:
 - a. Laki-laki kecenderungan mendatangi TPS menggunakan hak/suaranya mencapai 27.0% tidak mendatangi TPS 0.02%, sedang masi ragu-ragu 0.08%.
 - b. Perempuan kecenderungan mendatangi TPS mencapai 72.7% tidak mendatangi TPS 0%, sedang masi ragu-ragu 0%.

Grafik Persentase Kecendrungan Mendatangi TPS Dan Menggunakan Hak/suaranya Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasar data di atas terlihat bahwa kaum perempuan lebih stabil menentukan sikap untuk mendatangi TPS dan menggunakan hak/suaranya pada saat Pilkada nanti. Anomi menunjukkan pada perasaan tidak berguna. Mereka melihat bahwa aktifitas politik sebagai sesuatu yang sia-sia karena mereka merasa tidak mungkin mempengaruhi peristiwa atau kebijaksanaan politik. Bagi para pemilih

semacam ini, memilih atau tidak memilih tidak mempunyai pengaruh apa-apa, karena keputusan-keputusan politik sering kali berada di luar kontrol para pemilih. Sebab, para terpilih biasanya menggunakan logika-logikanya sendiri dalam mengambil berbagai keputusan politik, dan dalam banyak hal mereka berada jauh di luar jangkauan para pemilih. Perasaan *powerlessness* inilah yang disebut sebagai anomie.

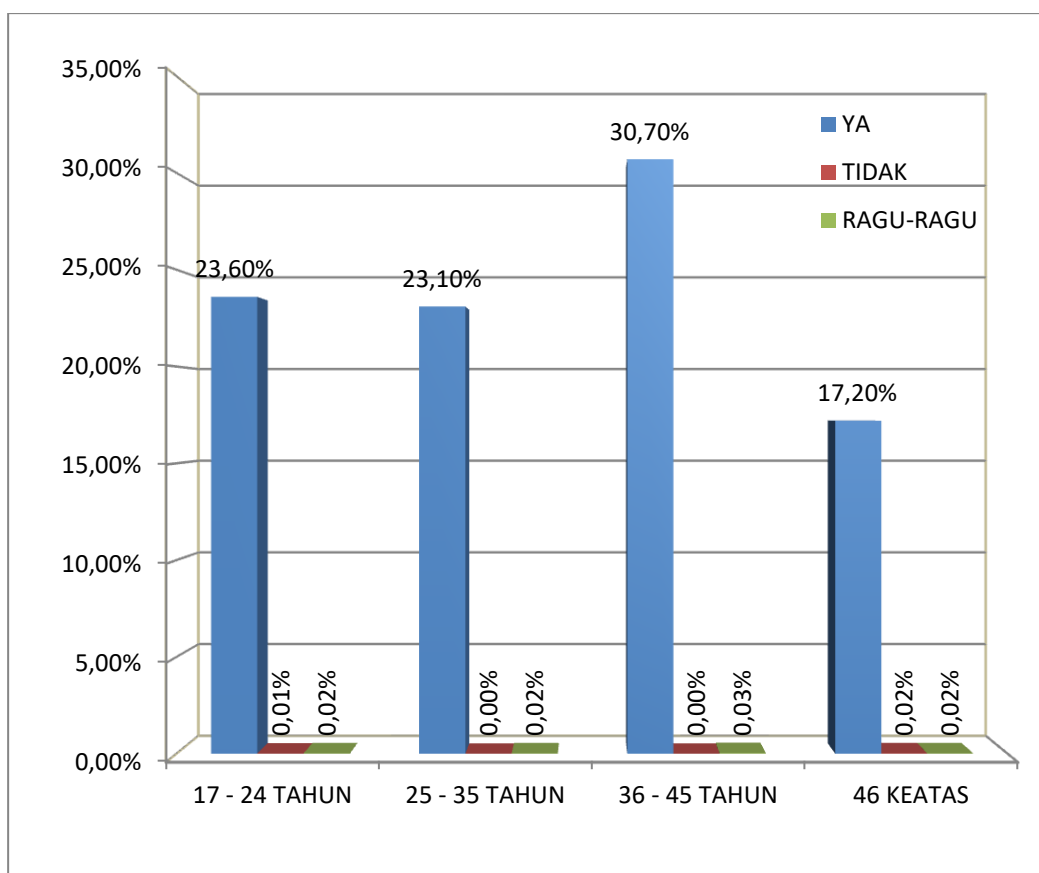
2. Kecenderungan pemilih mendatangi TPS menggunakan hak/suaranya berdasarkan tingkatan umur adalah:
 - a. Umur remaja menuju dewasa (17 tahun sampai dengan 24 tahun), mendatangi TPS menggunakan hak/suaranya mencapai 23.6%, tidak menggunakan hak/suaranya TPS 0.01%, sedang masi ragu-ragu 0.02%.
 - b. Umur matang dewasa (25 tahun sampai dengan 35 tahun) mendatangi TPS menggunakan hak/suaranya mencapai 23.1% tidak menggunakan hak/suaranya 0%, sedang masi ragu-ragu 0.02%.
 - c. Umur dewasa menuju tua (36 tahun sampai dengan 45 tahun) mendatangi TPS menggunakan hak/suaranya mencapai 30.7% tidak menggunakan hak/suaranya 0%, sedang masi ragu-ragu 0.03%.
 - d. Umur dewasa menuju tua (46 tahun ke atas) mendatangi TPS menggunakan hak/suaranya mencapai 17.2% tidak menggunakan hak/suaranya 0.02%, sedang masi ragu-ragu 0.02%.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa tingkatan pemilih dewasa menuju tua memiliki tingkat kecenderungan mendatangi TPS dan menggunakan hak/suaranya lebih tinggi mencapai 30.7%, dibandingkan dengan remaja 23.6%, remaja menuju dewasa 23.1%, dan tua 17.2%. Ini menunjukkan bahwa faktor kematangan usia menentukan kematangan pilihan politik, sehingga memiliki potensi untuk mendatangi TPS atau berpartisipasi dalam pemilukada nanti.

Sedangkan usia remaja, remaja menuju dewasa menunjukkan bahwa belum matang secara politik sehingga tingkat partisipasi politiknya terhitung sedang. Namun kecenderungan tersebut dapat

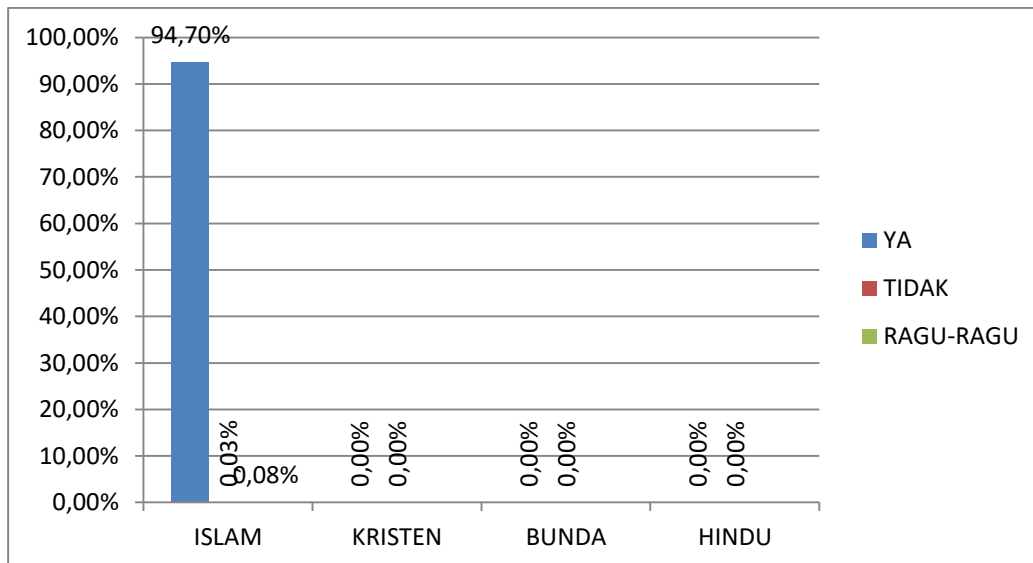
meningkat atau menurun sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk datang ke TPS dan menggunakan hak/suaranya, hal ini akan dibahas selanjutnya. Sedangkan usia tua memungkinkan pengaruh pikiran, fisik, dan pengalaman, sehingga kecenderungan untuk mendatangi TPS lebih rendah dari kelompok umur yang lain.

Grafik Persentase Kecenderungan Mendatangi TPS Dan Menggunakan Hak/suaranya Berdasarkan Umur



3. Kecenderungan pemilih mendatangi TPS menggunakan hak/suaranya berdasarkan Agama, adalah: karena semua sampel beragama Islam, mendatangi TPS menggunakan hak/suaranya mencapai 94.7% tidak menggunakan hak/suaranya 0.03%, sedang masi ragu-ragu 0.08%.

Grafik Persentase Kecendrungan Mendatangi TPS Dan Menggunakan Hak/suaranya Berdasarkan Agama

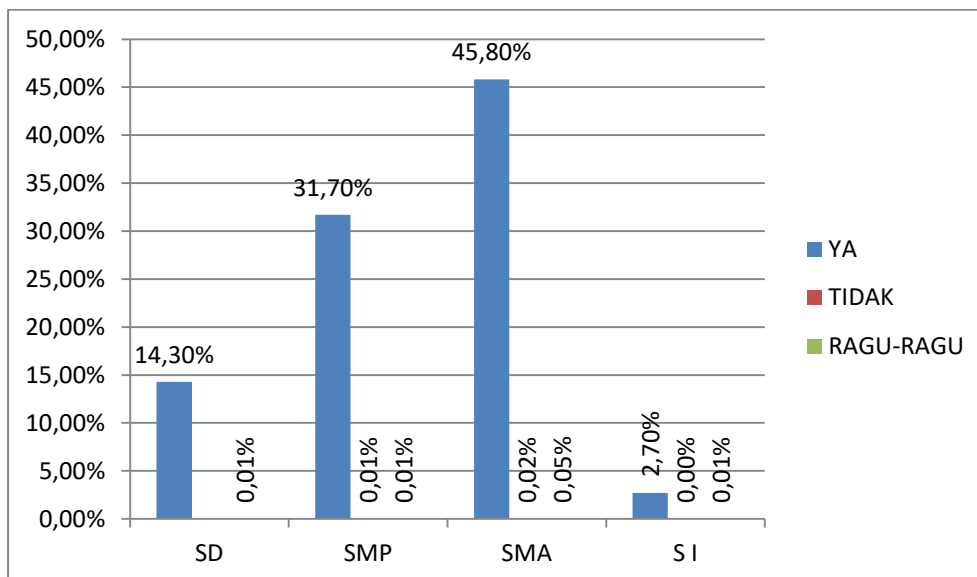


Variabel agama mengalami eror karena semua responden berasal dari satu agama sehingga tidak dapat menjadi perbandingan dengan agama-agama lain. Dengan pengertian bahwa faktor agama tidak dapat menjadi dasar untuk melihat kecendrungan mendatangi TPS berdasarkan dorongan kepercayaan atau agama. Namun demikian gambaran bahwa faktor agama juga sangat kuat mempengaruhi pandangan politik seseorang, dari gambaran angka kecendrungan mendatangi TPS cukup tinggi walaupun hanya terlihat dari satu kelompok agama.

4. Kecenderungan pemilih mendatangi TPS menggunakan hak/suaranya berdasarkan Pendidikan, adalah:
 - a. Tamatan Sekolah Dasar (SD) mendatangi TPS menggunakan hak/suaranya mencapai 14.3% tidak menggunakan hak/suaranya 0%, sedang masi ragu-ragu 0.01%.
 - b. Tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mendatangi TPS menggunakan hak/suaranya mencapai 31.7% tidak menggunakan hak/suaranya 0.01%, sedang masi ragu-ragu 0.01%.
 - c. Tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) mendatangi TPS menggunakan hak/suaranya mencapai 45.8% tidak menggunakan hak/suaranya 0.02%, sedang masi ragu-ragu 0.05%.

- d. Tamatan Sarjana mendatangi TPS menggunakan hak/suaranya mencapai 2.7% tidak menggunakan hak/suaranya 0%, sedang masi ragu-ragu 0.01%.

Grafik Persentase Kecenderungan Mendatangi TPS Dan Menggunakan Hak/suaranya Berdasarkan Pendidikan



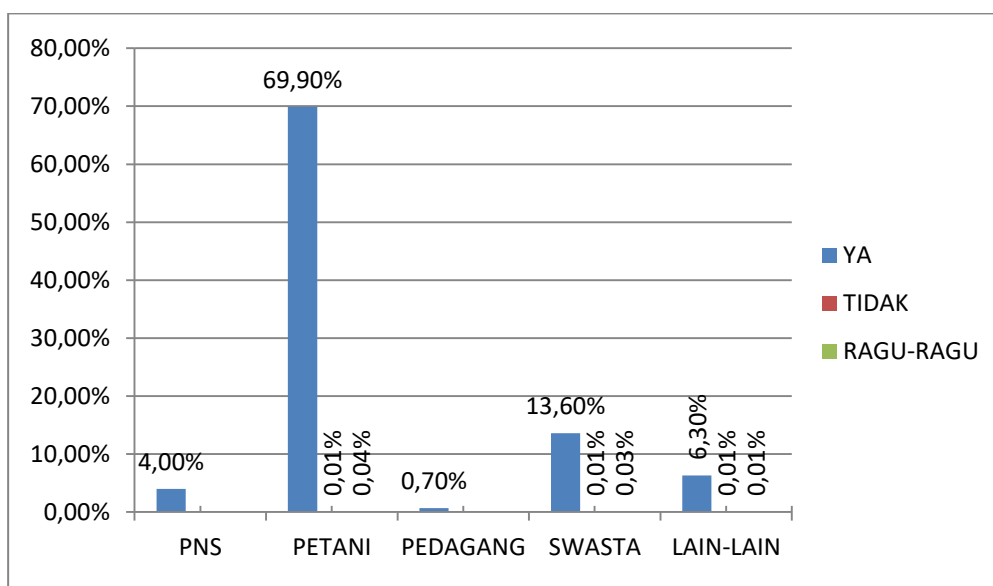
Variabel pendidikan memperlihatkan pengaruh yang cukup kuat terhadap kecenderungan pemilih mendatangi TPS, terlihat semakin tinggi pendidikan semakin besar angka partisipasi pemilih. Namun pada tingkat sarjana mengalami penurunan drastis dapat dijelaskan bahwa sarjana telah mengalami pengaruh pemikiran politik, sehingga mempengaruhi sikap dalam memilih.

Anomali ini memperlihatkan bahwa pendidikan menjadi pemilih jenis ini adalah pemilih yang kritis, artinya mereka akan selalu menganalisis kaitan antara sistem pilkada dengan kebijakan yang dibuat. tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut. Disamping memungkinkan seseorang menguasai aspek-aspek birokrasi, baik pada saat pendaftaran maupun pemilihan

5. Kecenderungan pemilih mendatangi TPS menggunakan hak/suaranya berdasarkan Pekerjaan, adalah:
- Pegawai Negeri Sipil mendatangi TPS menggunakan hak/suaranya mencapai 4.0% tidak menggunakan hak/suaranya

- 0%, sedang masi ragu-ragu 0%.
- Petani mendatangi TPS menggunakan hak/suaranya mencapai 69.9%, tidak menggunakan hak/suaranya 0.01%, sedang masi ragu-ragu 0.04%.
 - Pedagang mendatangi TPS menggunakan hak/suaranya mencapai 0.7%, tidak menggunakan hak/suaranya 0%, sedang masi ragu-ragu 0%.
 - Swasta mendatangi TPS menggunakan hak/suaranya mencapai 69.9%, tidak menggunakan hak/suaranya 0.01%, sedang masi ragu-ragu 0.03%.
 - Pekerjaan lain mendatangi TPS menggunakan hak/suaranya mencapai 6.3%, tidak menggunakan hak/suaranya 0.01%, sedang masi ragu-ragu 0.01%.

Grafik Persentase Kecendrungan Mendatangi TPS Dan Menggunakan Hak/suaranya Berdasarkan Pekerjaan



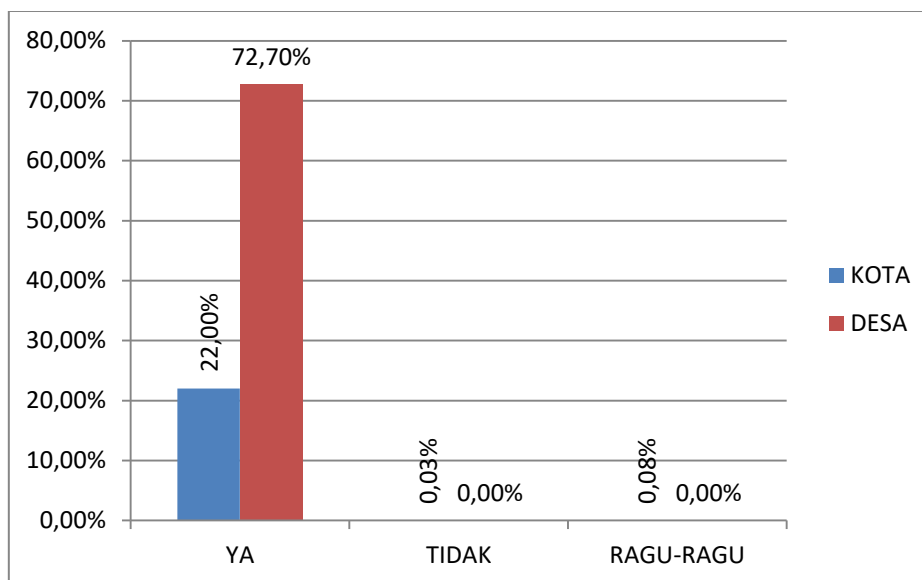
Berdasarkan data di atas terlihat mayoritas pekerjaan petani mengungguli kecendrungan hadir di TPS, dibandingkan dengan pekerjaan swasta, pedagang, PNS, dan pekerjaan-pekerjaan lain. Walaupun dipengaruhi geografis wilayah Rejang Lebong mayoritas mata pencarian masyarakat merupakan petani. Namun data ini menunjukkan korelasi yang cukup besar bahwa pekerjaan

mempengaruhi kecenderungan masyarakat untuk mendatangi TPS.

Ada beberapa alasan mengapa tingkat status sosial ekonomi berkorelasi dengan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih. *Pertama*, pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi warga. *Kedua*, pendapatan yang tinggi memudahkan orang untuk menanggung beban finansial akibat keterlibatannya dalam proses pemilu.

6. Kecenderungan pemilih mendatangi TPS menggunakan hak/suaranya berdasarkan Tempat Tinggal, adalah:
 - a. Pedesaan mendatangi TPS menggunakan hak/suaranya mencapai 22.0%, tidak menggunakan hak/suaranya 0.03%, sedang masi ragu-ragu 0.08%.
 - b. Perkotaan mendatangi TPS menggunakan hak/suaranya mencapai 72.7%, tidak menggunakan hak/suaranya 0%, sedang masi ragu-ragu 0%.

Grafik Persentase Kecenderungan Mendatangi TPS Dan Menggunakan Hak/suaranya Berdasarkan Tempat Tinggal

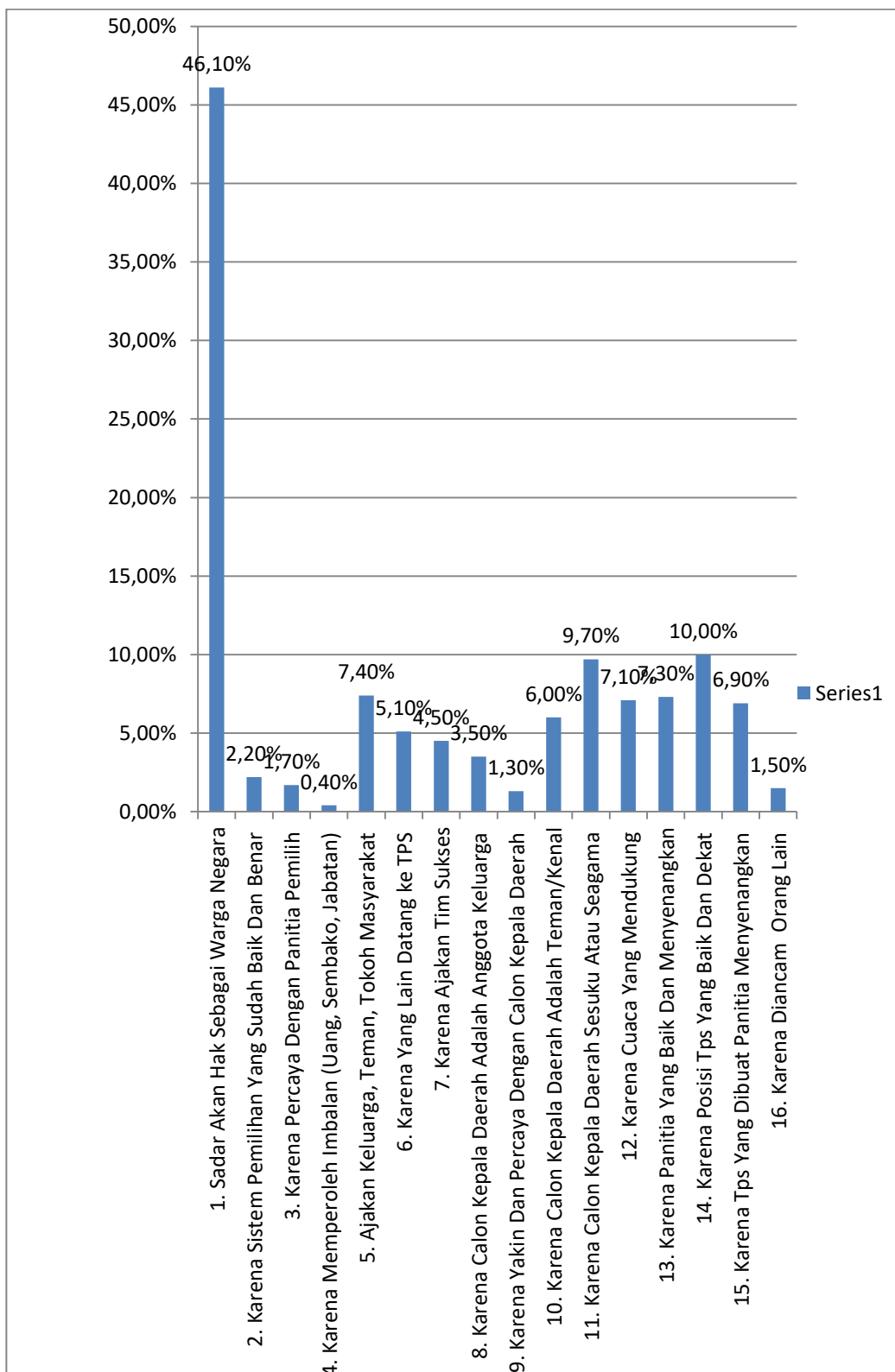


Berdasarkan tempat tinggal pemilih juga menentukan kecenderungan masyarakat mendatangi TPS, terlihat bahwa masyarakat yang tinggal di desa yang cenderung tidak banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar politik langsung lebih besar potensinya mendatangi TPS.

F. Faktor-faktor Pemilih Mendatangi TPS

Berdasarkan data di atas dan dikelompokkan berdasarkan sub-variabel yang menjadi faktor pemilih mendatangi TPS;

Grafik Faktor-faktor Pemilih Mendatangi TPS



Maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan sosial politik tak langsung

Lingkungan sosial politik tak langsung seperti sistem politik, ekonomi, budaya dan media massa, mempengaruhi 21.5% kecenderungan pemilih untuk mendatangi TPS.

2. Lingkungan sosial politik langsung

Lingkungan sosial politik langsung yang membentuk kepribadian pemilih seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok bergaul, mempengaruhi 36.2% kecenderungan pemilih untuk mendatangi TPS.

3. Struktur kepribadian

Sikap individu yang berbasis pada kepentingan, penyesuaian diri dan eksternalisasi, mempengaruhi 16.8% kecenderungan pemilih untuk mendatangi TPS.

4. Lingkungan sosial politik langsung berupa situasi

Keadaan yang mempengaruhi pemilih secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya, mempengaruhi 36.2% kecenderungan pemilih untuk mendatangi TPS.

G. Analisis

Digunakannya teori partisipasi politik dalam penelitian ini adalah karena, tingkat partisipasi politik adalah faktor yang menentukan apakah Pemilu ataupun Pilkada yang berlangsung berhasil atau tidak, semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih, maka tingkat keberhasilan Pemilu ataupun Pilkada semakin tinggi.

Dalam analisa Modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan Negara- negara berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik hanya memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, akan tetapi dengan berkembangnya demokrasi, banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin berpartisipasi dalam bidang politik khususnya

dalam hal pengambilan keputusan- keputusan mengena-mengenai kebijakan umum.¹

Secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik.

Herbert McClosky berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan- kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.²

Berikut ini dikemukakan sejumlah “rambu-rambu” partisipasi politik:³
Pertama, partisipasi politik berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga Negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. Karena sikap dan orientasi tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya.

Kedua, kegiatan tersebut diarahkan untuk mempengaruhi perilaku selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Seperti mengajukan alternative kebijakan umum, dan kegiatan mendukung atau menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah.

Ketiga, kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik.

Keempat, kegiatan mempengaruhi kebijakan pemerintah secara langsung yaitu mempengaruhi pemerintah dengan menggunakan perantara yang dapat meyakinkan pemerintah.

Kelima, mempengaruhi pemerintah melalui prosedur yang wajar dan tanpa kekerasan seperti ikut memilih dalam pemilu, mengajukan petisi, bertatap muka, dan menulis surat atau dengan prosedur yang tidak wajar seperti kekerasan, demonstrasi, mogok, kideta, revolusi, dll.

Di Negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini, tingginya tingkat

¹ Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2008. Hal 367

² Miriam Budiardjo *ibid.*,

³ Ramlan Surbakti, *Op.cit.*, hal. 141

partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu, tingginya tingkat partisipasi juga menunjukkan bahwa rezim yang sedang berkuasa memiliki keabsahan yang tinggi. Dan sebaliknya, rendahnya partisipasi politik di suatu Negara dianggap kurang baik karena menunjukkan rendahnya perhatian warga terhadap masalah politik, selain itu rendahnya partisipasi politik juga menunjukkan lemahnya legitimasi dari rezim yang sedang berkuasa.

Partisipasi sebagai suatu bentuk kegiatan dibedakan atas dua bagian, yaitu:⁴

- a. *Partisipasi aktif*, yaitu kegiatan yang berorientasi pada output dan input politik. Yang termasuk dalam partisipasi aktif adalah, mengajukan usul mengenai suatu kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan.
- b. *Partisipasi pasif*, yaitu kegiatan yang hanya berorientasi pada output politik. Pada masyarakat yang termasuk kedalam jenis partisipasi ini hanya menuruti segala kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa mengajukan kritik dan usulan perbaikan.

Kemudian terdapat masyarakat yang tidak termasuk kedalam kedua kategori ini, yaitu masyarakat yang menganggap telah terjadinya penyimpangan sistem politik dari apa yang telah mereka cita-citakan. Kelompok tersebut disebut apatis (golput).

- a. *Pemilih Rasional*

Pemilih jutamakan kemampuan ini memiliki orientasi yang tinggi terhadap *policy-Problem-Solving* dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau calon peserta pemilu dengan program kerjanya, mereka melihat program kerja tersebut melalui kinerja partai atau kontestan dimasa lampau, dan tawaran program yang ditawarkan sang calon atau partai politik dalam menyelesaikan berbagai

⁴ Ramlan Surbakti, *Ibid.*, hal 143

permasalahan yang sedang terjadi.

Pemilih jenis ini memiliki cirri khas yang tidak begitu mementingkan ikatan Ideologi kepada suatu partai politik atau seorang kontestan. Hal yang terpenting bagi pemilih jenis ini adalah apa yang bisa (dan yang telah) dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan pemilu.

b. Pemilih Kritis

Proses untuk menjadi jenis pemilih ini bisa terjadi melalui 2 hal yaitu *pertama*, jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai atau kontestan pemilu mana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan. *Kedua*, bisa juga terjadi sebaliknya di mana pemilih tertarik dulu dengan program kerja yang ditawarkan sebuah partai/kontestan baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan paham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan. Pemilih jenis ini adalah pemilih yang kritis, artinya mereka akan selalu menganalisis kaitan antara sistem partai ideology dengan kebijakan yang dibuat.

c. Pemilih Tradisional

Pemilih jenis ini memiliki orientasi ideology yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik atau kontestan pemilu. Kebijakan seperti yang berhubungan dengan masalah ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dll, dianggap sebagai prioritas kedua. Pemilih jenis ini sangat mudah dimobilisasi selama masa kampanye, pemilih jenis ini memiliki loyalitas yang sangat tinggi. Mereka menganggap apa saja yang dikatakan oleh seorang kontestan pemilu atau partai politik yang merupakan suatu kebenaran yang tidak bisa ditawar lagi.

d. Pemilih Skepsis

Pemilih jenis ini tidak memiliki orientasi ideology yang cukup tinggi

dengan sebuah partai politik atau kontestan pemilu, pemilih ini juga tidak menjadikan sebuah kebijakan menjadi suatu hal penting. Kalaupun mereka berpartisipasi dalam pemilu, biasanya mereka melakukannya secara acak atau random. Mereka berkeyakinan bahwa siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilu, hasilnya sama saja, tidak ada perubahan yang berarti yang dapat terbagi bagi kondisi Daerah/Negara.

Setelah melihat beberapa jenis pemilih, para kontestan pemilu nanti harus bisa memahami segala jenis pemilih dan berusaha merebut suara pemilih tersebut, yaitu tentunya melalui kampanye. Karena dengan memahami jenis pemilih yang ada, kemungkinan untuk memenangkan pemilu menjadi semakin kuat. Mereka harus mampu meraih suara dari setiap jenis pemilih yang ada. Untuk itu mereka pada umumnya membutuhkan dukungan dari tokoh-tokoh ataupun hal-hal yang membuat setiap jenis pemilih di atas mau mendukung mereka dalam pemilu (Pilkada) nanti.

Lipset membagi atau mengelompokkan beberapa faktor yang mempengaruhi kehadiran atau ketidakhadiran pemilih kedalam empat kategori. *Pertama*, keterkaitan dengan kebijakan pemerintah. Para pemilih yang tidak mempunyai keterkaitan cukup dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat ketidakhadirannya dalam pemilu. *Kedua*, akses terhadap informasi. Para pemilih yang kurang mempunyai akses terhadap informasi cenderung tinggi tingkat ketidakhadirannya. *Ketiga*, Adanya tekanan kelompok-keleompok tertentu, seperti kelompok Golput misalnya. Terakhir, tekanan menyilang (cross-pressures), seperti orangtua memilih PPP mertua memilih Golkar.⁵

Namun, Konsep Cross-Pressures sebenarnya tidak hanya sebatas dalam pengertian di atas. Seorang pemilih yang mempunyai status “menyilang” juga termasuk dalam konsep ini. Misalnya, seorang pemilih yang tingkat pendidikannya tinggi sementara tingkat pendapatannya rendah: seorang pemilih yang berlatar belakang Islam santri dari keluarga PPP

⁵ Sherman and Kolker. 1987

namun bekerja sebagai pegawai negeri, dan sebagainya.⁶

Jika mengamati karakteristik pendukung Golkar dan Faktor-faktor yang melatarbelakanginya, tampaknya kategori-kategori Lipset diatas tidak dapat menjelaskan secara memuaskan. Misalnya, bagaimana menjelaskan para pendukung Golput yang umumnya berasal dari kalangan muda terpelajar. Ini berarti kontras dengan data yang ditemukan oleh Lipset, bahwa tingginya tingkat pendidikan berkorelasi positif dengan tingginya tingkat kehadiran dalam pemilu

Untuk itu, agaknya diperlukan Variabel-Variabel tambahan untuk menjelaskan Fenomena non-Voting secara memuaskan. Salah satu alternatif yang bisa ditawarkan adalah dengan menghubungkan Variabel-variabel yang lebih bersifat Psikologis. Penjelasan-penjelasan psikologis, dalam banyak kasus dan dibanyak negara seringkali lebih dapat atau setidaknya melengkapi Penjelasan-penjelasan Lipset diatas. Penjelasan psikologis ini pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu penjelasan-penjelasan yang lebih menitik beratkan faktor kepribadian-individual dan penjelasan-penjelasan yang lebih menitik beratkan orientasi kepribadian.⁷

Penjelasan faktor kepribadian-individual melihat bahwa perilaku non-voting disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tidak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi,, dan semacamnya. Orang yang tidak mempunyai kepribadian tidak toleran atau tidak acuh cenderung untuk tidak memilih. Sebab, apa yang diperjuangkan kandidat atau partai politik tidak selalu sejalan dengan kepentingan perorangan secara langsung, karena tidak berhubungan dengan kepentingannya.

Sementara itu, penjelasan psikologis yang lebih menitik beratkan faktor orientasi kepribadian melihat bahwa perilaku *non-voting* disebabkan oleh orientasi kepribadian pemilih yang menunjukkan karakteristik apatis, anomi, dan alienasi. Perasaan apatis sebenarnya merupakan jelmaan atau pengembangan lebih jauh dari kepribadian otoriter. Yang secara sederhana ditandai dengan tiadanya minat terhadap persoalan-persoalan politik. Hal ini

⁶ Milbrath, 1977

⁷ *Ibid*

bisa disebabkan oleh rendahnya sosialisasi atau rangsangan (stimulus) politik, atau adanya perasaan (anggapan) bahwa aktivis politik tidak menyebabkan perasaan kepuasan atau hasil secara langsung.

Anomi menunjukkan pada perasaan tidak berguna. Mereka melihat bahwa aktifitas politik sebagai sesuatu yang sia-sia karena mereka merasa tidak mungkin mempengaruhi peristiwa atau kebijaksanaan politik. Bagi para pemilih semacam ini, memilih atau tidak memilih tidak mempunyai pengaruh apa-apa, karena keputusan-keputusan politik sering kali berada di luar kontrol para pemilih. Sebab, para terpilih biasanya menggunakan logika-logikanya sendiri dalam mengambil berbagai keputusan politik, dan dalam banyak hal mereka berada jauh di luar jangkauan para pemilih. Perasaan powerlessness inilah yang disebut sebagai anomie.

Sedangkan alienasi berada di luar apatis dan anomie. Alienasi merupakan perasaan keteransingan secara aktif. Pemerintah dianggap tidak mempunyai pengaruh --terutama pengaruh baik—terhadap kehidupan seseorang. Bahkan pemerintah dianggap sebagai sesuatu yang mempunyai konsekuensi jahat terhadap kehidupan manusia. Jika perasaan alienasi ini memuncak, mungkin akan mengambil bentuk alternative aksi politik. Seperti memalui kerusuhan, kekacauan, demonstrasi dan semacamnya.⁸

Sementara itu Einsinger dan kawan-kawan mengidentifikasi tiga faktor yang mempengaruhi kehadiran atau ketidakhadiran pemilih. *Pertama*, bagaimana para pemilih didaftar dan dimobilisasi pada saat pemilu. *Kedua*, hubungan persaingan partai dan kehadiran dalam pemilu. *Ketiga*, variasi kecendrungan pemilih diantara kelompok.⁹ Jika cara pendaftaran terlalu menyusahkan pemilih, ada kecendrungan tingkat kehadiran pemilih cukup tinggi. Di Amerika Serikat misalnya, hanya pemilih yang tingkat pendidikannya tinggi dan pendapatannya besar yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendaftarkan diri.¹⁰

Variabel lain yang digunakan menjelaskan perilaku golput adalah variabel kepercayaan politik. Namun, menjelaskan golput dengan konsep

⁸ *Ibid*

⁹ (Einsinger, 1990)

¹⁰ lowi and ginsbert, 1990

kepercayaan selalu mengandung pengertian ganda. Pertama, golput dapat diinterpretasi sebagai ekspresi atas perasaan keterasingan (alienasi). Pada sisi lain, golput juga dapat diinterpretasi sebagai ekspresi kepercayaan yang tinggi. Misalnya, ada bukti kuat bahwa partisipasi dalam sistem politik meningkat pada saat terjadi krisis. Dengan begitu, golput menandakan bahwa mereka puas dengan sistem politik yang ada.¹¹ Dalam konteks semacam ini, golput merupakan pertanda kepercayaan pada sistem politik yang ada. Susan Welch dkk. Menulis, “nonvoting adalah bentuk pemberian ijin kepada pemerintah untuk melakukan apa yang dikehendaknya”.¹²

Disamping itu, ilmuwan politik seringkali memahami golput dari variabel status sosial ekonomi. Setidaknya ada tiga indikator yang biasa digunakan mengukur variabel status sosial ekonomi. Yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan pekerjaan. Lazimnya, variabel status sosial ekonomi digunakan untuk menjelaskan perilaku pemilih. Namun, dengan menggunakan proposisi yang berlawanan. Pada saat yang sama variabel tersebut sebenarnya juga dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku non voting atau golput.

Tesis utama yang dipakai adalah, tingkat ketidakhadiran pemilih berkorelasi secara signifikan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan. Tesis ini sebenarnya bermula dari banyaknya temuan penelitian tentang perilaku memilih. Yang menunjukkan tingkat kehadiran pemilih dari pemilih yang berpendidikan dan berpenghasilan tinggi. Hasil temuan Verba dan Nie menyimpulkan, “*the best know about turnout is than citizen higher social n economic status parcitipate more in politic...*”.¹³

Ada beberapa alasan mengapa tingkat status sosial ekonomi berkorelasi dengan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih. *Pertama*, tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut. Disamping memungkinkan seseorang menguasai aspek-aspek birokrasi, baik pada saat pendaftaran maupun pemilihan. *Kedua*, pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi

¹¹ Gamson, 1971

¹² Welch, 1991.

¹³ Verba and Nie, 1977

warga. *Ketiga*, pendapatan yang tinggi memudahkan orang untuk menanggung beban finansial akibat keterlibatannya dalam proses pemilu.¹⁴

¹⁴ wolfinger, 1980

Bab 4

Penutup

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang merupakan penjelasan mengenai alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam penelitian itu dipandang menarik, penting dan perlu untuk diteliti. Perumusan masalah juga merupakan suatu usaha yang menyatakan pertanyaan-pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicari pemecahannya. Atau dengan kata lain perumusan masalah merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti didasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah.

Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kecenderungan perilaku pemilih mendatangi TPS dalam Pilkada di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015 nanti, sangat tinggi mencapai 94,7% menjawab “iya” akan hadir di TPS. Dilihat dari sub-variabel:
 - a. Sub-variabel jenis kelamin ternyata kaum perempuan lebih tinggi kecenderungan hadir di TPS dibandingkan kaum laki-laki.
 - b. Sub-variabel agama, cukup signifikan kecenderungan pemilih hadir TPS pada Pilkada nanti.
 - c. Sub-variabel umur, umur remaja sampai matang dewasa memiliki kecenderungan menaik untuk hadir di TPS, dibandingkan kaum tua.
 - d. Sub-variabel pendidikan, pendidikan menengah atas memiliki

- potensi lebih besar untuk hadir di TPS dibandingkan tamatan sekolah menengah pertama, tamatan sekolah dasar, bahkan sarja.
- e. Sub-variabel pekerjaan, ternyata pekerjaan petani (yang merupakan pekerjaan mayoritas masyarakat Rejang Lebong) memiliki potensi lebih tinggi untuk hadir di TPS, dibandingkan dengan pekerjaan, swasta, PNS, Pedagang, dan pekerjaan lain-lain.
 - f. Sub-variabel tempat tinggal, ternyata masyarakat yang tinggal di desa lebih besar potensinya untuk hadir di TPS dibandingkan masyarakat yang tinggal di perkotaan.
2. Berdasarkan pertanyaan selanjutnya kecenderungan perilaku pemilih yang mendatangi TPS menggunakan hak pilih/suaranya dalam Pilkada di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015 nanti. Ternyata tidak berbeda dengan kecenderungan mereka hadir di TPS.
- a. Sub-variabel jenis kelamin ternyata kaum perempuan lebih tinggi kecenderungan menggunakan hak/suaranya ketika hadir di TPS dibandingkan kaum laki-laki.
 - b. Sub-variabel agama, cukup signifikan kecenderungan pemilih menggunakan hak/suaranya ketika hadir di TPS pada Pilkada nanti.
 - c. Sub-variabel umur, umur remaja sampai matang dewasa memiliki kecenderungan menaik untuk menggunakan hak/suaranya ketika hadir di TPS, dibandingkan kaum tua.
 - d. Sub-variabel pendidikan, pendidikan menengah atas memiliki potensi lebih besar untuk menggunakan hak/suaranya ketika hadir

- di TPS dibandingkan tamatan sekolah menengah pertama, tamatan sekolah dasar, bahkan sarja.
- e. Sub-variabel pekerjaan, ternyata pekerjaan petani (yang merupakan pekerjaan mayoritas masyarakat Rejang Lebong) memiliki potensi lebih tinggi untuk menggunakan hak/suaranya ketika hadir di TPS, dibandingkan dengan pekerjaan, swasta, PNS, Pedagang, dan pekerjaan lain-lain.
 - f. Sub-variabel tempat tinggal, ternyata masyarakat yang tinggal di desa lebih besar potensinya untuk menggunakan hak/suaranya ketika hadir di TPS dibandingkan masyarakat yang tinggal di perkotaan.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan perilaku pemilih mendatangi TPS dan menggunakan hak pilih/suaranya dalam Pilkada di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015 adalah:
- a. Sikap individu yang berbasis pada kepentingan, penyesuaian diri dan eksternalisasi, mempengaruhi 16.8% kecenderungan pemilih untuk mendatangi TPS.
 - b. Lingkungan sosial politik langsung yang membentuk kepribadian pemilih seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok bergaul, mempengaruhi 36.2% kecenderungan pemilih untuk mendatangi TPS.
 - c. Lingkungan sosial politik tak langsung seperti sistem politik, ekonomi, budaya dan media massa, mempengaruhi 21.5% kecenderungan pemilih untuk mendatangi TPS.
 - d. Keadaan yang mempengaruhi pemilih secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya,

mempengaruhi 36.2% kecenderungan pemilih untuk mendatangi TPS.

B. Implikasi Hasil Penelitian dan Saran

Hasil penelitian ini berimplikasi pada:

1. Tingginya kecenderungan pemilih hadir di TPS, memperlihatkan partisipasi masyarakat akan tinggi sehingga harus dijaga stabilitas dan pencitraan penyelenggaraan Pilkada ke depan.
2. Sosialisasi dan penyebaran informasi tentang sistem dan teknis penyelenggaraan Pilkada harus dilakukan secara intensif dan masif.
3. KPU harus berkoordinasi dengan pihak terkait maupun dengan kompetitor agar terjaga tatanan penyelenggaraan Pilkada yang bersih dan sehat.
4. Bagi masyarakat secara umum harus tetap berpandangan rasional dan objektif, sehingga tidak cepat terpengaruh oleh pemikiran dan tindakan yang dapat mengganggu penyelenggaraan Pilkada ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Asfar, Muhammad. *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*. Pustaka Eureka. 2006.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta : Gramedia. 2008.

Firmanzah, *Marketing Politik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2007.

Prihatmoko, Joko j. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Semarang : Pustaka Pelajar. 2005.

Usman, Husaini dan Purnomo. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung : Bumi Aksara. 2004.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : LP3ES. 1998.

Sastroatmodjo, Sujijono. *Perilaku Politik*. Semarang. Ikip Semarang Press. 1995.

Malian, Sobirin. *Menakar Loyalitas dan Votalitas Pemilih Pada Pemilu 2004*.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo. 1999.

Surbakti, Ramlan. *Partai, Pemilih dan Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1997.

Wibawanto, Agung. *Menangkan Hati dan Pikiran Rakyat*. Yogyakarta : Pembaruan. 2005.

Horald, F Gosnel. 1934. *Ensyklopedia Of The Social Science*. New York : Mc Grew Hill Book Company.

Undang-Undang

Lampiran 1

Kisi-kisi Penelitian

Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS (Voter Turn-Out) Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015

No.	VARIABEL	INDIKATOR	SUB-INDIKATOR
1.	Prilaku Pemilih Mendatangi TPS	a. Partisipasi politik aktif.	Jika memiliki kesadaran dan kepercayaan politik yang tinggi
		b. Partisipasi politik apatis	Jika memiliki kesadaran dan kepercayaan politik yang rendah.
		c. Partisipasi politik pasif.	Jika memiliki kesadaran politik rendah, sedangkan kepercayaan politiknya tinggi
		d. Partisipasi politik militant radikal	Jika memiliki kesadaran politik tinggi, sedangkan kepercayaan politiknya rendah.
2.	Faktor-faktor Pemilih Prilaku Pemilih Mendatangi TPS	a. Lingkungan sosial politik tak langsung	Seperti sistem politik, ekonomi, budaya dan media massa.
		b. Lingkungan sosial politik langsung yang membentuk kepribadian pemilih	seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok bergaul
		c. Struktur kepribadian	Sikap individu yang berbasis pada kepentingan, penyesuaian diri dan eksternalisasi.
		d. Lingkungan sosial politik langsung berupa situasi	Keadaan yang mempengaruhi pemilih secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya

Kuesioner Penelitian
Pusat Penelitian Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Curup Dan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rejang Lebong

Judul Penelitian :

Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS (Voter Turn-Out) Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015

Data Responden

Nama :	
Jenis kelamin :	Lk/Pr
Umur :	
Agama :	
Pendidikan :	
Pekerjaan :	
Alamat :	

Cara Menjawab : Beri tanda centeng (√) pada kolom jawaban yang anda inginkan.

1. Apakah anda mendatangi TPS dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong akhir tahun 2015 nanti?

No.	Pilihan Jawaban	Jawaban
1.	Ya	
2.	Tidak	
3.	Ragu-ragu	

2. Apakah anda mendatangi TPS menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong akhir tahun 2015 nanti?

No.	Pilihan Jawaban	Jawaban
1.	Ya	
2.	Tidak	
3.	Ragu-ragu	

3. Apa alasan anda mendatangi TPS Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong akhir tahun 2015 nanti?

No.	Pilihan Jawaban	Jawaban
1.	Sadar Akan Hak Sebagai warga Negara	
2.	Karena sistem pemilihan yang sudah baik dan benar	
3.	Karena percaya dengan Panitia Pemilih	
4.	Karena memperoleh imbalan (Uang, Sembako, Jabatan)	
5.	Ajakan Keluarga, Teman, Tokoh Masyarakat	
6.	Karena yang lain datang ke TPS	
7.	Karena ajakan Tim Sukses	
8.	Karena Calon Kepala Daerah adalah anggota keluarga	
9.	Karena Yakin dan Percaya dengan Calon Kepala Daerah	
10.	Karena Calon Kepala Daerah adalah teman/kenal	
11.	Karena Calon Kepala Daerah sesuku atau seagama	
12.	Karena cuaca yang mendukung	
13.	Karena Panitia yang baik dan menyenangkan	
14.	Karena Posisi TPS yang baik dan dekat	
15.	Karena TPS yang dibuat Panitia menyenangkan	
16.	Karena diancam orang lain	

Catatan: Untuk soal no.3 boleh mencontreng (√) lebih dari satu jawaban

Terima Kasih!!!!



Цели и задачи программы, описание ее содержания, перечень мероприятий, сроки проведения, ответственные лица.

УТВЕРЖДАЮ:



Программа утверждена и согласована с руководителем организации.

Программа разработана на основе анализа потребностей организации и ее сотрудников.

- Разработчик: [Имя]
- Проверено: [Имя]
- Утверждено: [Имя]
- Исполнитель: [Имя]

Место проведения программы:

- Место: [Имя]
- Адрес: [Имя]
- Имя: [Имя]

Дата утверждения: [Имя]

Согласовано: [Имя]



Адрес: [Имя]
 Контакт: [Имя]
 Телефон: [Имя]
 E-mail: [Имя]

SURAT KETERANGAN

Nomor : 033/12/insan.cita/SK/I/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adiyatna Arifin. M.Pd
Alamat : GRAHA INSAN CITA CURUP
Jabatan : Kepala Toko

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama/Peneliti : Fakhruddin, Baryanto, Muhammad Anshori
Judul Penelitian : Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS (Voter Turn-Out) Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015
Presentase : 19 % (Low Plagiarism)
Perguruan Tinggi : IAIN Curup

Adalah benar-benar telah kami teliti dan check karya ilmiahnya tersebut diatas pada tanggal 11 Desember 2021 dengan metode software yang sudah terverifikasi oleh sistem internet (Turnitin & Plagiarism X Checker) sehingga dapat diketahui keabsahan karya tulis ilmiahnya untuk menghindari dari plagiat atau plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Admin Insan Cita Media,
Adiyatna Arifin, M.Pd

Awards & Certifications

"PlagiarismCheckerX is an award winning software. Yes, we dislike boasting off but happily share our achievements and worldwide recognition. The positive reviews that we have received from numerous independent, industry-related organizations and testing agencies are additional. So, when you download the software, keep in mind that the scanning capabilities and innovative features of PlagiarismCheckerX have worldwide praise."

